

2021

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I

LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU

**JL. GARUDA NO. 149 KEL. LUBUK AMAN
KEC. LUBUKLINGGAU BARAT 1
KOTA LUBUKLINGGAU**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
HIGHLIGHT LAPKIN TRIWULAN I TAHUN 2021	vi
BAB I . PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Organisasi	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.3 Struktur Organisasi Loka POM di Kota Lubuklinggau	3
1.4 Kegiatan Utama Loka POM di Kota Lubuklinggau	4
1.5 Kegiatan Prioritas Loka POM di Kota Lubuklinggau	4
1.6 Isu Strategis: Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama	5
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis	12
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021	29
2.3 Perjanjian Kinerja Triwulan I Tahun 2021	29
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Triwulan I Tahun 2021	31
2.5 Metode Pengukuran & Kriteria Pencapaian	33
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	34
3.2 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN I	37
3.3 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN II	47
3.4 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN III	57
3.5 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN IV	59
3.6 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN V	64
3.7 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VI	67
3.8 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VII	70
3.9 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VIII	71
3.10 REALISASI ANGGARAN	73
BAB IV. PENUTUP	75

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia-Nya sehingga Loka POM di Kota Lubuklinggau dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau Triwulan I tahun 2021 dan senantiasa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Laporan Kinerja Interim Triwulan I tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015, dalam rangka menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dikenal dengan *Good governance* dan *Clean government*.

Laporan Kinerja Interim Triwulan I tahun 2021 merupakan laporan kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai salah satu UPT Badan POM sesuai Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Disamping sebagai mempertanggungjawabkan kinerja, juga sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan sasaran strategis, dalam upaya memperbaiki dokumen perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan pada triwulan selanjutnya, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja kedepannya.

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan I Loka POM di Kota Lubuklinggau tertuang Laporan Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau dari bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2021 tentang pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja TW 1 Tahun 2021 serta evaluasi dan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Akhirnya diharapkan Laporan Kinerja yang telah tersusun ini dapat menjadi pertanggungjawaban bagi Loka POM di Kota Lubuklinggau dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja organisasi dimasa mendatang.

Lubuklinggau, 20 April 2021
Kepala Loka Pengawas Obat dan
Makanan di Kota Lubuklinggau



Afdil Kurnia, S.Si., Apt



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau Triwulan I Tahun 2021 merupakan informasi tentang Pengukuran Kinerja dan Pengukuran Efektifitas Kegiatan selama Triwulan I (Januari sampai dengan Maret) tahun 2021. Pengukuran ini menyajikan capaian Perjanjian Kinerja tahun 2021 yang telah ditetapkan sebelumnya yang sesuai dengan Rencana Strategis Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2020-2024.

Loka POM di Kota Lubuklinggau selama 12 (dua belas) bulan berjalannya tahun 2021 harus mencapai 8 (delapan) kegiatan yang sebelumnya telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Pencapaian sasaran tersebut diwujudkan melalui program pengawasan obat dan makanan di Loka POM di Kota Lubuklinggau. Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri dan hasil penilaian pusat, diperoleh gambaran hasil capaian sebagai berikut:

1. Pada Triwulan I Tahun 2021 dari 8 (Delapan) Sasaran Kegiatan terdapat 5 (lima) sasaran kegiatan yang kriteria capaiannya dapat dihitung di triwulan I dengan 5 (lima) sasaran kegiatan mencapai kriteria “BAIK” dan 2 (dua) sasaran kegiatan mencapai kriteria “SANGAT KURANG”. Selain itu terdapat 1 (satu) sasaran kegiatan yang belum dapat dihitung pada triwulan I.
2. Dari 8 (Delapan) Sasaran Kegiatan yang ditargetkan :
 - a. Sasaran Kegiatan target pertama yaitu “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT” mencapai kriteria **“BAIK” (97,41%)**. Hasil tersebut didapat dari capaian 4 (Empat) indikator dengan 2 (dua) indikator kriteria “SANGAT BAIK” yaitu Persentase Obat yang memenuhi syarat (119.62%) dan Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (95.69%), 1 (satu) indikator kriteria “TIDAK DAPAT DISIMPULKAN” yaitu Persentase Makanan yang memenuhi syarat (125%) dan 1 (satu) indikator kriteria “SANGAT KURANG” yaitu Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (49.34%) dimana pengujian dilakukan di Balai Koordinator yaitu Balai Besar POM di Palembang.
 - b. Sasaran Kegiatan kedua yaitu “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT” dengan kriteria pencapaian **“SANGAT KURANG” (44,53%)**. Hasil tersebut didapat dari capaian 5 (Lima) indikator dengan 1 (satu) indikator kriteria “BAIK” yaitu Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (97,51%), 1 (satu) indikator kriteria “BAIK”



yaitu Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan (80.89%), 2 (dua) indikator kriteria “SANGAT KURANG” yaitu Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan (44.26%) hal ini dikarenakan masih belum maksimalnya koordinasi terhadap lintas sektor dan stakeholder terkait dan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (0%) hal ini dikarenakan sarana produksi yang diperiksa merupakan sarana yang belum pernah dilakukan pemeriksaan sebelumnya. Selain itu terdapat satu indikator yang belum dapat dihitung di triwulan I yaitu Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu karena pelaksanaan akan dilakukan di triwulan II dan IV.

- c. Sasaran Kegiatan ketiga yaitu “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT” dengan kriteria pencapaian **“BAIK” (104,57%)**.
- d. Sasaran Kegiatan keempat yaitu “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT” dengan kriteria pencapaian **“BAIK” (108,63%)**. Hasil tersebut didapat dari capaian 2 (dua) indikator dengan 1 (satu) indikator kriteria “SANGAT BAIK” yaitu Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar (114.89%) dan 1 (satu) indikator kriteria “BAIK” yaitu Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar (102.37%).
- e. Sasaran Kegiatan kelima yaitu “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT” dengan kriteria pencapaian **“SANGAT KURANG” (0%)** karena pada Triwulan I masih dalam proses intelegensi/penyelidikan.
- f. Sasaran Kegiatan keenam yaitu “Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal” dengan kriteria **“BAIK”(100 %)**. Hasil tersebut didapat dari capaian 3 (tiga) Indikator dengan Kriteria “BAIK” yaitu Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT (100%), Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu (100%) dan Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (100%).
- g. Sasaran Kegiatan ketujuh yaitu “Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal” **belum dapat dihitung di triwulan I** karena perhitungan akan dilakukan pada akhir triwulan IV.
- h. Sasaran Kegiatan kedelapan yaitu “Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel” dengan kriteria **“CUKUP” (81,52%)**.



3. Pencapaian realisasi anggaran kegiatan pada triwulan I sebesar 19,65% (Rp. **688.493.093,-**) dari Rp. **3.503.339.000** Anggaran Tahun 2021 Loka POM di Kota Lubuklinggau yang diwujudkan melalui 8 sasaran kegiatan.

Langkah-langkah antisipatif agar memenuhi target ditahun berikutnya, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan kompetensi petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau dibidang pengawasan obat dan amakan seperti pelaksanaan sampling, pemeriksaan sarana dan pembuatan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
2. Meningkatkan kepatuhan terhadap prioritas sampling dan juga menyesuaikan rencana sampling dengan mengkhususkan sampel yang akan di sampling di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau merupakan sampel yang tidak beresiko rusak saat pengiriman serta menambah variasa sample yang akan disampling.
3. Melakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang secara rutin untuk melihat sekaligus memberikan pembinaan dalam penjaminan mutu produk obat dan makanan yang diproduksi dan diedarkan.
4. Memperluas KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau khususnya bagi pelaku usaha dibidang obat dan makanan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
5. Memanfaatkan aplikasi SMART POM untuk mempercepat proses tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta menghimbau Dinas terkait di kabupaten/kota untuk aktif menggunakan aplikasi SMART POM.
6. Pemeriksaan yang dilakukan, selain untuk melihat kesesuaian penerapan peraturan yang berlaku, juga sekaligus melakukan pembinaan guna mengingatkan stakeholder untuk melakukan perbaikan/ merespon surat tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disampaikan.
7. Melakukan pengawasan bersama di sarana distribusi obat dan makanan yang dilakukan, dimana setiap pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OMKA di luar ibukota Provinsi didampingi oleh petugas dari instansi pembina yang ada di kabupaten/kota terkait.
8. Memfasilitasi jaringan komunikasi, baik dengan lintas sektor ataupun penanggung jawab sarana sehingga dapat dijadikan media konsultasi dan KIE terkait obat dan makanan.
9. Mendorong Dinas terkait untuk dapat memanfaatkan Dana alokasi khusus (DAK) untuk pembinaan dan pengawasan obat dan makanan.
10. Meningkatkan intensitas KIE secara online di media sosial baik berupa infografis, video maupun konten interaktif lainnya.



11. Meningkatkan variasi konten mengenai obat dan makanan yang dapat diterima pada seluruh lapisan masyarakat.
12. Menjalin komunikasi dengan media lokal terkait pemberitaan seputar kegiatan Loka POM di Kota Lubuklinggau.
13. Meningkatkan koordinasi antara Loka POM di Kota Lubuklinggau dengan Balai Koordinator terkait perencanaan sampling yang semakin baik.
14. Meningkatkan pembinaan terkait pemenuhan persyaratan produk yang boleh beredar saat dilakukan pemeriksaan sarana distribusi.
15. Melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik antar lintas sektor sebagai upaya meningkatkan kinerja fungsi Penindakan.
16. Menjaga koordinasi dengan lintas sektor terkait (Korwas, Kejari, dan Pengadilan) sehingga dapat terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik.
17. Melakukan koordinasi dengan Bidang Penindakan BBPOM di Palembang (PPNS Bidang Penindakan BBPOM di Palembang) sehingga dapat bersinergi pada saat akan dilakukannya kegiatan Penindakan dan Penyidikan.
18. Meningkatkan perencanaan terkait kegiatan intelijen dan kegiatan operasi penindakan sehingga dapat memenuhi target jumlah perkara yang akan diproses Pro Justitia maupun Non Justitia oleh PPNS Loka POM di Kota Lubuklinggau.
19. Melaksanakan patroli siber secara rutin sejalan dengan dibentuknya Direktorat Patroli Siber.
20. Mengedepankan upaya cegah tangkal sejalan dengan Paradigma baru ke deputian 4 (empat) yang mengisyaratkan bahwa Penindakan dan Penyidikan sebagai *Ultimatum Remedium* atau sebagai langkah terakhir .
21. Mendorong peran Agen Perubahan serta seluruh pegawai untuk menciptakan inovasi sebagai solusi dari permasalahan di Loka POM di Kota Lubuklinggau.
22. Meningkatkan konsistensi masing-masing penanggung jawab dalam melakukan pelaporan dokumen ketatausahaan.
23. Menyediakan media untuk berbagi data untuk keperluan tindak lanjut permintaan data antar bagian untuk pengisian setiap dokumen agar meningkatkan efektifitas dalam penyusunan dokumen.
24. Menidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi bermasalah sedini mungkin, disertai dengan alternatif solusi.
25. Meningkatkan ketelitian Pejabat serta pengelola keuangan dalam melaksanakan pembayaran belanja untuk meminimalkan pengembalian/kesalahan SPM atau retur SP2D.

Highlight TW I Januari sd Maret 2021

1. Pengawasan Vaksin Covid-19 di Wilayah Pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau.

Loka POM di Kota Lubuklinggau melakukan pengawasan Vaksin Covid-19 di wilayah pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau. Pengawasan diawali dengan pengawasan terhadap kesiapan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dalam pendistribusian Vaksin Covid-19 di Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Lahat.



Selanjutnya dilakukan pengawasan terhadap distribusi vaksin dari Palembang menuju Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara. Pengawasan juga dilakukan saat dilakukan launching vaksin di Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Empat Lawang.





Selain itu pengawasan juga dilakukan terhadap sarana pelayanan kesehatan yang menyimpan vaksin seperti puskesmas, rumah sakit dan juga gudang farmasi. Serangkaian pengawasan ini dilakukan untuk memastikan kondisi dan mutu vaksin terjaga dengan baik hingga nanti disuntikkan.



2. Sosialisasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk Sarana Usaha Kopi.

Loka POM di Kota Lubuklinggau berkoordinasi dengan Dewan Kopi Sumatera Selatan dan Lahat menyelenggarakan Sosialisasi terkait Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik. Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2021 bertempat di Hotel Grand Zuri Kabupaten Lahat. Sosialisasi diikuti oleh 50 orang pengusaha kopi. Pada kegiatan sosialisasi ini Bapak Afdil Kurnia, S.Si., Apt selaku kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau menyampaikan materi terkait Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik serta Registrasi Pangan Olahan di Badan POM. Selain itu Bapak M. Syahriza, S.H selaku Sekretaris Dewan Kopi Sumatera Selatan juga menyampaikan materi mengenai pengelolaan tanaman kopi dan pasca panen kopi.

Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat menambah pengetahuan para pelaku usaha kopi mengenai cara mengolah biji kopi dan cara produksi kopi yang baik serta

dapat meningkatkan kerjasama antara Loka POM di Kota Lubuklinggau dan Komunitas Penggiat Kopi Kabupaten Lahat.



3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada Pedagang di Pasar Tradisional di Kota Lubuklinggau.

Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan KIE terkait pengawasan bahan berbahaya dengan menggunakan mobil laboratorium keliling di beberapa pasar tradisional di Kota Lubuklinggau yaitu Pasar Bukit Sulap pada tanggal 23 Februari 2021, Pasar Inpres pada tanggal 24 Februari 2021 dan Pasar Simpang Periuk tanggal 30 Maret 2021. Pada kegiatan ini dilakukan sampling dan pengujian terhadap produk pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya seperti mie kuning basah dan tahu. Kepada pedagang selanjutnya dilakukan KIE mengenai waspada pangan yang mengandung bahan berbahaya serta Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar dan Kedaluwarsa).



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Organisasi

Peningkatan tindak kecurangan para pelaku usaha dengan menggunakan bahan yang tidak layak dan berbahaya dapat memberikan dampak berbahaya bagi masyarakat yang mengkonsumsi obat dan makanan tersebut. Untuk mencegah hal tersebut terjadi maka dibentuklah suatu lembaga yang memastikan keamanan obat dan makanan yang beredar dimasyarakat, dan memastikan pengawasan produk pada saat sebelum dan juga selama beredar dipasaran sebagai tindak pencegahan untuk menjamin bahwa obat dan makanan yang beredar telah memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, dan juga mutu produk. Berdasarkan Peraturan Presiden RI nomor 80 tahun 2017 Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas Obat dan Makanan membentuk satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu/ atau teknis penunjang tertentu dibidang pengawasan obat dan makanan yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis (UPT). Dalam klasifikasi UPT salah satunya terdiri atas Loka Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Loka POM.

Loka POM di Kota Lubuklinggau bertanggung jawab terhadap pengawasan obat dan makanan dengan wilayah kerja Kota Lubuklinggau, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Musi Rawas Utara.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/ fasilitas produksi dan /atau distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (*sampling*), dan pengujian obat dan makanan, intelejen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Menurut Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam melaksanakan tugas Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai salah satu UPT BPOM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- i. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Dilingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

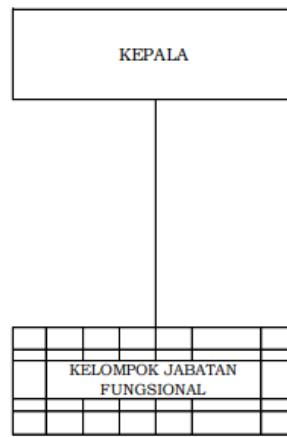
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas masing-masing. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

1.3. Struktur Organisasi Loka POM di Kota Lubuklinggau

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Loka POM di Kota Lubuklinggau

Loka POM di Kota Lubuklinggau merupakan Unit Pelaksana Teknis BPOM sesuai Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2020 dengan wilayah kerja adalah sebanyak 5 Kabupaten/kota yang terdiri atas:

Kabupaten/Kota		Jumlah Kecamatan
1.	Lubuklinggau	8
2.	Lahat	22
3.	Empat Lawang	10
4.	Musi Rawas	14
5.	Musi Rawas Utara	7
Total		61

Tabel 1.1 Catchment Area Loka POM di Kota Lubuklinggau

Dalam mendukung tugas-tugas Loka POM di Kota Lubuklinggau sesuai peran dan fungsinya, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan potensi yang sesuai. Saat ini, SDM yang dimiliki Loka POM di Kota Lubuklinggau adalah 23 orang yang terdiri dari 14 orang ASN dan 9 orang PPNPN.

1.4 Kegiatan Utama Loka POM di Kota Lubuklinggau

Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM mempunyai Kegiatan Utama diantara nya :

1. Persentase obat yang memenuhi syarat
2. Persentase makanan yang memenuhi syarat
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
7. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
8. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
9. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
10. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
11. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
12. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
13. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
14. Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT
15. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu
16. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu
17. Indeks Profesionalitas ASN UPT
18. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT

1.5 Kegiatan Prioritas Loka POM di Kota Lubuklinggau

1. Permintaan dukungan kepada pemerintah kota terkait hibah tanah ke badan pom untuk pembangunan kantor loka pom di kota lubuklinggau

2. Pendampingan UMKM dalam pengurusan sertifikasi produk pangan dan kosmetik untuk peningkatan ekonomi rakyat.
3. Peningkatan kerjasama Badan POM dengan pemerintah daerah dalam peningkatan pengawasan obat dan makanan di daerah sesuai dengan inpres no. 3 tahun 2017 dan KepMendagri No. 41 tahun 2018
4. Pelaksanaan PI dan KIE Obat dan Makanan yang aman
5. Kerjasama dengan Pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan Badan POM dan mengikuti kegiatan Pemda
6. Pemeriksaan saran distribusi obat, pangan, kosmetik, OT dan Suplemen
7. Pemeriksaan sarana produksi obat, pangan, kosmetik, OT dan Suplemen (saat ini hanya terdapat sarana produksi pangan)
8. Kegiatan pengambilan contoh (sampling) dan pengujian obat dan makanan
9. Pengawasan keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS)
10. Perkara pidana di bidang penyidikan obat dan makanan
11. Pengawasan bahan berbahaya yang ditambahkan pada produk pangan yang beredar di pasar tradisional di kabupaten/kota.
12. Pengelolaan anggaran sebagai satuan kerja mandiri Loka POM di Kota Lubuklinggau

1.6 Isu Strategis

Loka POM di Kota Lubuklinggau merupakan salah satu UPT BPOM dimana yang mempunyai posisi strategis berkaitan dengan tugas utama pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang obat dan makanan. Produk-produk ini merupakan kebutuhan dasar manusia tetapi sekaligus juga beresiko memberi dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat apabila tidak dikelola dengan benar, dipergunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan. Karena itu perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan yang baik (*Good regulatory practice*) agar keamanan, manfaat dan mutu produk-produk tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai UPT BPOM yang berada dibawah Balai Koordinator BBPOM di Palembang perlu menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat/ konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dengan kepentingan strategis lainnya yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Identifikasi potensi dan permasalahan Loka POM di Kota Lubuklinggau dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan

dihadapi BPOM dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tahun 2020-2024.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang.

Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu eksternal dengan elemen masyarakat yakni masih banyaknya pedagang yang menjual obat bebas terbatas tanpa memiliki izin mengedarkan, sehingga masyarakat memperoleh obat bukan dari sarana yang legal. Hal inilah yang menjadi tantangan Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam melakukan pengawasan dan peningkatan Komunikasi dan Edukasi (KIE) terhadap masyarakat sehingga diharapkan masyarakat/ konsumen mendapatkan obat yang aman, bermutu dan dapat memperoleh informasi langsung dari ahlinya.

2. Wilayah Kerja yang Cukup Luas dengan Keterbatasan SDM

Cakupan wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau yang cukup luas dengan keterbatasan SDM yang ada tentunya menjadi isu eksternal dari elemen wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau, mengingat hal ini beresiko masuknya produk Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) ke wilayah pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau. Sehingga hal ini dapat menjadi tantangan Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam melakukan deteksi sejak dini terhadap produk Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) yang masuk.

3. Adanya Kegiatan Tumpang Tindih dengan Instansi Lain

Kegiatan instansi lain yang masih tumpang tindih terkait obat dan makanan menyebabkan adanya perbedaan informasi tentang obat dan makanan pada masyarakat, mengingat Loka POM di Kota Lubuklinggau merupakan UPT BPOM yang masih baru yakni baru berdiri 10 Oktober 2018, sehingga masyarakat ataupun instansi lain di daerah pengawasan Loka POM belum familiar atau mengetahui

mengenai Tupoksi Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam melakukan pengawasan obat dan makanan. Hal menjadi tantangan Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam melakukan perluasan Komunikasi dan Edukasi (KIE) dan membangun jejaring kerja sama dengan *stakeholder* yang berkaitan dengan obat dan makanan.

4. Pandemic COVID-19

Pada 11 Maret 2020, WHO (World Health Organization) telah menetapkan corona virus disease 2019 (Covid-19) sebagai pandemi. Virus dengan nama resmi SARS-CoV-2 ini pertama kali diidentifikasi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada Desember 2019, dan sudah menjalar ke 213 negara dan wilayah lain di seluruh dunia. Data tanggal 18 April 2020, kasus pasien positif virus corona (Covid-19) di dunia mencapai 2.324.731 kasus, dengan 160.434 kasus kematian, dan 595.467 kasus berhasil sembuh. Indonesia telah menyatakan Covid-19 sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Di Indonesia, hingga tanggal 18 April 2020, jumlah pasien yang positif terinfeksi virus corona (Covid-19) sebanyak 6.248 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 535 meninggal dunia dan 631 orang dinyatakan telah sembuh dari Covid-19. Jumlah kasus virus corona di Indonesia masih terus meningkat. Demi menekan laju penyebaran, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah diantaranya physical/social distancing, melakukan tes massal atau rapid test untuk mencegah penyebaran virus covid-19, pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di sejumlah daerah, refocussing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19), K/L agar mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatankegiatan yang bersifat mendukung percepatan penanganan Covid-19. Masyarakat diharuskan ikut berpartisipasi untuk memerangi pandemi virus covid-19, yaitu dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, senantiasa menggunakan masker, membiasakan cuci tangan menggunakan sabun, membersihkan lingkungan terdekat menggunakan desinfektan, tidak melakukan perjalanan keluar daerah, dan senantiasa menjaga stamina tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan suplemen kesehatan serta berolahraga secara rutin.

Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan kinerja dan pelayanan publik dengan metode work from home (WFH). Pelaksanaan pelayanan publik dilakukan melalui online. Selain itu Loka POM di Kota Lubuklinggau mendukung pencegahan penyebaran Covid-19 dengan cara senantiasa melakukan komunikasi, informasi dan

edukasi kepada masyarakat baik secara langsung dengan menggunakan Mobil Laboratorium Keliling maupun secara online melalui media sosial berupa instagram, facebook, twitter maupun youtube resmi Loka POM di Kota Lubuklinggau; melakukan pemantauan kesehatan pegawai secara rutin (setiap hari) dengan melakukan pengecekan suhu sebelum memasuki kantor; dan berkoordinasi dengan Pemda (Walikota, Dinas Kesehatan dan Satgas Covid-19 Kota Lubuklinggau) dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

5. Adanya perjanjian-perjanjian internasional

Khususnya di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas/*Free Trade Area (FTA)* diantaranya perjanjian ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) *FTA*, *ASEAN-China FTA*, *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)*, *ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA)*, *ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA)* dan *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA)*. Perdagangan bebas ini membuka peluang perdagangan obat dan makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau. Hal ini merupakan salah satu penyebab beredarnya produk ilegal (tanpa izin edar, palsu, dan substandar) serta makanan yang mengandung bahan berbahaya.

6. Berlakunya program *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Yang meliputi 17 *goals* bidang pengawasan Obat dan Makanan, terdapat beberapa agenda terkait dengan :

- a. *Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture.* Tantangan bagi BPOM ke depan adalah penyusunan kebijakan teknis terkini tentang standar gizi pangan olahan, pengawalan mutu, manfaat, dan keamanan pangan olahan, serta KIE kepada masyarakat.
- b. *Goal 3 Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages,* salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian JKN, termasuk di dalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu.

Tantangan bagi Loka POM di Kota Lubuklinggau ke depan adalah intensifikasi pengawasan *pre-market* dan *post-market*, serta pembinaan pelaku usaha agar secara mandiri menjamin mutu produknya.

7. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Merupakan tantangan bagi Loka POM di Kota Lubuklinggau untuk bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan.

8. Adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional

Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai unit pelaksana teknis BPOM merupakan salah satu penyelenggara subsistem sediaan farmasi dan makanan yaitu menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

9. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan untuk mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui percepatan pengembangan industri farmasi dan alkes.

10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan,

Dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* RB 2010-2025.

12. Arahan Presiden Joko Widodo untuk dilakukan penguatan pengawasan Obat dan Makanan melalui penguatan kelembagaan BPOM.

Penguatan terhadap kelembagaan BPOM telah mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan di antaranya BPK RI dan Komisi IX DPR RI yang menyatakan bahwa diperlukan penguatan kelembagaan BPOM sesuai dengan kebutuhan organisasi BPOM yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Dengan adanya penguatan kelembagaan BPOM ini Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai UPT BPOM akan merasakan dampak terutama dalam hal menjalin kerjasama yang bersinergi dengan pemangku kepentingan serta dalam hal kewibawaan di lingkungan pemerintah daerah.

13. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongpraajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I.

Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*), dengan *one line command* (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.

14. Masih banyaknya penduduk yang mengkonsumsi obat modern dibandingkan dengan obat tradisional, sehingga menjadi tantangan bagi Loka POM di Kota Lubuklinggau untuk melakukan pengawasan *post-market* termasuk farmakovigilans

15. Pertumbuhan penduduk dan perubahan komposisi penduduk

Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2010-2015 sebesar 1,48, tahun 2010-2016 sebesar 1,46, tahun 2010 -2017 adalah 1,44 persen, tahun 2010-2018 adalah 3,15% dan tahun 2010-2019 adalah 1,39%.

16. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam produksi dibidang obat dan makanan serta meningkatnya tren transaksi online, menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak secara *bussiness as usual* namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

17. Adanya perkembangan teknologi informasi, dapat menjadi potensi bagi Loka POM di Kota Lubuklinggau untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Loka POM di Kota Lubuklinggau digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kota Lubuklinggau periode 2020-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada Loka POM di Kota Lubuklinggau.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kota Lubuklinggau mengacu pada Renstra BBPOM Palembang tahun 2020 – 2024. Sasaran strategis ini disusun selaras dengan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM, sebagai berikut :

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

INDIKATOR KINERJA LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU:

Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kota Lubuklinggau berdasarkan Renstra BBPOM Palembang tahun 2020-2024, terdiri dari 18 indikator, seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini :

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM Lubuklinggau	Persentase obat yang memenuhi syarat
		Persentase makanan yang memenuhi syarat
		Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan



3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di Lingkup UPT Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2021

Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikator sasaran kegiatan ini pada Loka POM di Kota Lubuklinggau adalah sebagai berikut:

- Persentase Obat yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 83,60% di tahun 2021
- Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 80,00% di tahun 2021
- Persentase Obat yang berkualitas berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 95,00% di tahun 2021
- Persentase Makanan yang berkualitas berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 76,00% di tahun 2021

Indikator ini sekaligus sebagai salah satu ukuran keberhasilan tujuan Loka POM di Kota Lubuklinggau yaitu “Meningkatnya kualitas Obat dan Makanan”.

Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari masing-masing indikator diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat

Defenisi:

- a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017)
- b. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.
- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
 - 2) Produk kadaluarsa
 - 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
 - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
- f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji.
- g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

Cara perhitungan sebagai berikut :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- c. Sampel Obat mencakup sampel balai dan Loka.



Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat

Defenisi:

- a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
- c. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.
- d. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
 - 2) Produk kadaluarsa
 - 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan label
 - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- e. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- f. Jika termasuk poin d.1, d.2 atau d.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji.
- g. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS
- h. kesimpulan produk pangan random/acak adalah bahwa hasil evaluasi penandaan (MK atau TMK) mempengaruhi hasil kesimpulan akhir.

Cara perhitungan sebagai berikut :

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak Makanan MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka.

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Defenisi:

- Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017)
- Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.
- Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
 - 2) Produk kedaluwarsa
 - 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
 - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
- Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji.
- Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

Catatan:



- Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- Dalam pengambilan kesimpulan di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Koordinator.

Cara perhitungan sebagai berikut :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Defenisi:

- a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
- c. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.
- d. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.
- e. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.



$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Catatan:

- Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- Dalam pengambilan kesimpulan di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Koordinator.

sampel targeted :

- pangan olahan berlabel : Evaluasi penandaan + diuji → kesimpulan produk : evaluasi penandaan tidak mempengaruhi hasil uji
- pangan olahan tidak berlabel : tetap diuji (Harus melewati evaluasi penandaan (mk/tmk) SIPT, jadi yang tidak ada label pilihannya MK label) → kesimpulan produk hasil sampling targeted: evaluasi penandaan tidak mempengaruhi hasil uji

Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator kinerja utama (IKU) adalah sebagai berikut:

- Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target sebesar 89% di tahun 2021
- Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target sebesar 60% di tahun 2021
- Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target sebesar 88% di tahun 2021
- Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 55% di tahun 2021
- Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 63% di tahun 2021



Defenisi Operasional:

- a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan:
 1. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.
 2. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
 3. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:
 - 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat
 - 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 4. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - 1) Pelaku usaha;
 - 2) Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
- b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder:
 1. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
 2. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
 3. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:



- pelaku usaha;
- lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
- 4. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
- 5. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.
PERHATIKAN: Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.
- c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu:
 - 1. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:
 - a) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
 - b) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
 - c) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
 - d) Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
 - e) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
 - f) Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan
 - g) Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK
 - h) Sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga
 - 2. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.
- d. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan
 - Sarana Produksi Obat
Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan instalasi farmasi rumah sakit).



- ✓ Memenuhi Ketentuan adalah apabila tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa Perbaikan.

➤ Sarana Produksi OT

Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

- ✓ Untuk sarana IOT: tidak ada temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.
- ✓ Untuk sarana UKOT dan UMOT: tidak ada temuan kritis atau sanitasi higien major.

Catatan: Pemeriksaan sarana UKOT dan UMOT akan menggunakan form yang berbeda dengan sarana produksi IOT

➤ Sarana Produksi Kosmetik

Sarana produksi kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B.

- ✓ Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

➤ Sarana produksi Suplemen Kesehatan

Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan.

- ✓ Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

➤ Sarana Produksi Pangan

Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

- ✓ Sarana produksi pangan MD yang memperoleh rating A dan B.
- ✓ Sarana produksi IRTP/UMKM memperoleh level 1 dan 2.

Catatan: Pemeriksaan sarana IRTP/UMKM menggunakan form pemeriksaan yang berbeda dengan sarana produksi (industri) pangan

PERHATIKAN: Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pedoman

e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

1. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).
2. Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:
 - a) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat



- b) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
- c) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
- d) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Sasaran Strategis 3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Kota Lubuklinggau

Pengawasan Obat dan Makanan ke depannya lebih preventif dan proaktif, di antaranya melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan serta pemberdayaan masyarakat agar masyarakat mampu melindungi diri dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan. Komunikasi, informasi dan edukasi tentang obat dan makanan diharapkan dapat membekali pengetahuan kepada masyarakat tentang produk obat, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, dan pangan yang aman untuk dikonsumsi. Dengan peningkatan efektivitas komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dapat mengunggah komunitas desa, pasar dan komunitas sekolah supaya berdaya, berpartisipasi dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan keamanan pangan di komunitasnya masing-masing.

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) :

- Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan, dengan target sebesar 92,5% di tahun 2021

Defenisi Operasional:

a. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

1. Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).
2. Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:
 - a) KIE melalui media cetak dan elektronik;
 - b) KIE langsung ke masyarakat; dan
 - c) KIE melalui media sosial
3. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:
 - a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
 - b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;



- c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan
- 4. Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir.
- 5. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey

Cara Perhitungan:

Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan

Sasaran Kegiatan 4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah Loka POM di Kota Lubuklinggau.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator kinerja utama (IKU):

- Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 50% di tahun 2021
- Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 50% di tahun 2021

Defenisi Operasional:

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Pada perhitungan persentase sampel yang diperiksa dan diuji sesuai standar, $\frac{\text{jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel obat}}$, yang dimaksud jumlah target sampel obat

adalah jumlah target sampel obat selama 1 tahun. Serta yang dimaksud jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar adalah obat yang sudah selesai diuji di lab.

- a. Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan
- b. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.
- c. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
- d. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- e. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar



- a. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.
- b. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
- c. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- d. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Sasaran Kegiatan 5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau.

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu : Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target sebesar 58% di tahun 2021.

Defenisi Operasional:

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

1. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
 - b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
 - c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
 - d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)
3. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penilaian Persentase Keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a. SPDP sebesar 15% --nilai A [(a+b+c+d) / Jumlah perkara]
- b. Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- c. P21 sebesar 30% dan – nilai C [(c+d) / Jumlah perkara]
- d. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D [d/ jumlah perkara]

Nilai Tingkat keberhasilan =

$$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times \frac{\text{Jumlah capaian}}{\text{Target perkara}}$$

Sasaran Kegiatan 6. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal.

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas system dan prosedur kerja. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut :



- a. Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT, hingga akhir tahun 2021 ditargetkan 100%;
- b. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu, hingga akhir tahun 2021 ditargetkan 100%.
- c. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu, hingga akhir tahun 2021 ditargetkan 100%.

Sasaran Kegiatan 7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berkinerja optimal

SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) : Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau, hingga akhir tahun 2021 ditargetkan 82.

Defenisi Operasional:

- a) Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
- b) Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
- c) Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:
 1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
 2. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
 3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
 4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami



Catatan: Form Survei disiapkan oleh Biro Umum dan SDM.

Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Sasaran Kegiatan 8. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-12, dengan ukuran keberhasilannya adalah sebagai berikut :

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau, hingga akhir tahun 2021 ditargetkan 92,00.

Defenisi Operasional:

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau

1. Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.
2. Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input: $IE = (\% \text{capaian output}) / (\% \text{capaian input})$
3. Standar efisiensi (SE) adalah 1

4. Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). $TE = (IE - SE) / SE$
5. Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien.
6. Kriteria:
 - Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
 - Tidak efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021

Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kota Lubuklinggau tahun 2021 masih mengacu pada Renstra Balai Besar POM di Palembang 2020-2024. Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran (kinerja/hasil), indikator, dan target kinerja tahunan yang akan dicapai serta strategi (program/kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pengajuan usulan kegiatan dan anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2021. Pada dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat 8 sasaran kegiatan dengan 18 indikator kinerja kegiatan. Rencana Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran 2 pada Laporan Kinerja ini.

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau. Perjanjian Kinerja terdiri dari format yang menghubungkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Pada akhir tahun 2020 telah disusun Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2021. Pada dokumen Perjanjian Kinerja 2020 memuat 8 sasaran kegiatan dengan 18 indikator kinerja kegiatan. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau tahun 2021 yang sudah ditandatangani dapat dilihat pada Lampiran 3 pada Laporan Kinerja Interim ini. Adapun Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM Lubuklinggau	Persentase obat yang memenuhi syarat	83,60%
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	80,00%
		Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,00%
		Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,00%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,00%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88,00%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,50%
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
5	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	58,00%
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di Lingkup UPT	100,00%
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100,00%
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,00%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau	82,00%
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau	92,00%



Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2021

Kegiatan

- Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia
- Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Anggaran

Rp. 1.081.142.000,-
Rp. 2.422.197.000,-

2.4.Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2021

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Indikator		Target 2021	Target triwulanan (kumulatif)			
			s,d TW I (Jan-Mar)	s,d TW II (Jan-Jun)	s,d TW III (Jan-Sept)	s,d TW IV (Jan-Des)
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60%	83,60%	83,60%	83,60%	83,60%
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,00%	76,00%	76,00%	76,00%	76,00%
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00%	89,00%	89,00%	89,00%	89,00%
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88,00%	88,00%	88,00%	88,00%	88,00%



8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%
9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%	63,00%	63,00%	63,00%	63,00%
10	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,50	92,50	92,50	92,50	92,50
11	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	12,50%	25,00%	37,50%	50,00%
12	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	12,50%	25,00%	37,50%	50,00%
13	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	58,00%	15,00%	30,00%	48,00%	58,00%
14	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100 %	25,00%	50,00%	75,00%	100 %
15	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100 %	25,00%	50,00%	75,00%	100 %
16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100 %	40,00%	60,00%	80,00%	100 %
17	Indeks Profesionalitas ASN UPT	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00
18	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00

Tabel 2.3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2021



2.5 METODE PENGUKURAN & KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Pengukuran Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau dilakukan dengan berpedoman pada Defenisi Operasional Indikator Kinerja Utama yang telah dijelaskan pada Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kota Lubuklinggau yang dikumpulkan oleh Penanggungjawab data Monev yang ada di Sub Koordinator Substansi Program & Evaluasi dengan berkoordinasi dengan personel yang telah ditugaskan oleh Koordinator/Sub Koordinator masing-masing.

Kriteria pengukuran dari hasil capaian terhadap target adalah sebagai berikut:

Kriteria	Rentang Capaian (Existing)	Rentang Capaian Lapkin 2020 TW1
Sangat Kurang		<50%
Kurang	< 75	$50\% \leq x < 70\%$
Cukup	75 - 100	$70\% \leq x < 90\%$
Baik	100	$90\% \leq x < 110\%$
Sangat Baik	100-125	$110\% < x \leq 120\%$
Tidak dapat disimpulkan	> 125	> 120%

Tabel 2.4. Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Rencana Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2021 penetapan kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau tahun 2021 memuat 8 (delapan) sasaran kegiatan. Pencapaian semua sasaran kegiatan Loka POM di Kota Lubuklinggau pada TW I tahun 2021 telah berlangsung pada tahun kedua dari periode Rencana Strategis Loka POM di Kota Lubuklinggau tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN KEGIATAN	NILAI CAPAIAN SASARAN	KRITERIA
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	97,41%	Baik
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	44,53%	Sangat kurang
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	104,57%	Baik
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	108,63%	Sangat Baik
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan makanan di Loka POM di Kota Lubuklinggau	0%	Sangat kurang
6.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal	100%	Baik
7.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berkinerja optimal		



8.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara akuntabel	81,52%	Cukup
----	--	--------	-------

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan TW I Tahun 2021

Sasaran kegiatan yang ditetapkan diukur dengan 18 indikator kinerja utama. Secara lengkap perbandingan target, realisasi dan capaian setiap indikator kinerja utama dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET TW 1	REALISASI TW 1	CAPAIAN TW 1
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	1.	Persentase obat yang memenuhi syarat	83,60%	100%	119,62%
		2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80%	100%	125%
		3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95%	90,91%	95,69%
		4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76%	37,50%	49,34%
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	5.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89%	72%	80,90%
		6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60%	28,56%	44,26%
		7.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88%	0%	0%



LAPORAN KINERJA TW I 2021
LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET TW 1	REALISASI TW 1	CAPAIAN TW 1
		8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55%	0%	0%
		9.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63%	61,43%	97,51%
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	10.	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,50%	96,73%	104,57%
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	11.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	12,80%	102,37%
		12.	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	14,36%	114,89%
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kota Lubuklinggau wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	13.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	58%	0%	0%
6.	Terwujudnya Tata	14.	Presentase implementasi	25%	25%	100%

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET TW 1	REALISASI TW 1	CAPAIAN TW 1
	Kelola Pemerintahan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal		rencana aksi Reformasi% Birokrasi di lingkup Loka POM di kota Lubuklinggau			
		15.	Presentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	25%	25%	100%
		16.	Presentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	40%	40%	100%
7.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berkinerja optimal	17.	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau	-	-	-
8.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara Akuntabel	18.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau	Efisien (92%)	75%	81,52%

Tabel 3.2 Perbandingan target dan realisasi pencapaian indikator kinerja utama TW I tahun 2021

Dari 18 (delapan belas) indikator kinerja utama (IKU) terdapat 3 indikator yang mencapai target dengan kriteria sangat baik, 6 indikator dengan kriteria baik, 1 indikator dengan kriteria cukup, 1 indikator mempunyai capaian melebihi 120% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan, dan 5 indikator dengan kriteria sangat kurang. Analisa tentang capaian ini akan dibahas secara rinci dalam uraian pencapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja sebagai berikut.

3.2. PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN I

1. TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU

Sasaran Kegiatan ini terdapat 4 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 97,41% dengan kriteria baik. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW 1- 2021	REALISA SI TW 1- 2021	CAPAIAN	KRITERIA
1	Persentase obat yang memenuhi syarat	83.60%	100%	119,62%	Sangat Baik
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80%	100%	125%	Tidak dapat disimpulkan
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95%	90,91%	95,69%	Baik
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76%	37,50%	49,34%	Sangat Kurang
Rata-rata3				97,41%	Baik

Tabel 3.3 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan I

Penjelasan mengenai capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-I sebagai berikut:

A. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Indikator kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat menggunakan rumus sbb:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan
2. Sampel obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling, sampel obat sesuai dengan catchment area
3. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP

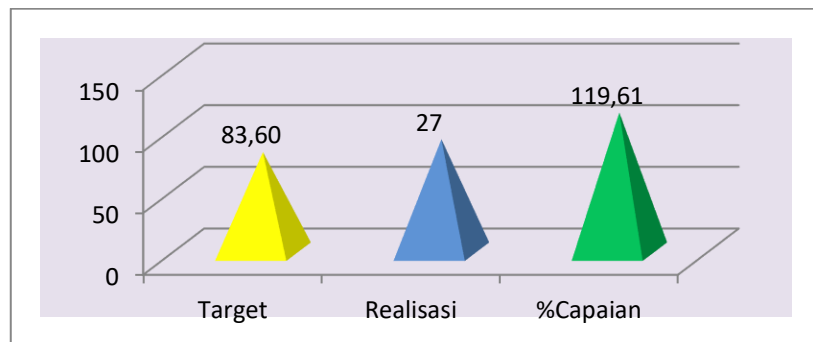
4. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label
5. Loka POM di Kota Lubuklinggau yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri, sehingga pengujian dilaksanakan oleh balai koordinator

Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
2. Produk kedaluarsa
3. Produk rusak
4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW 1- 2021	REALISASI TW 1-2021	CAPAIAN TW 1-2021	KRITERIA
Persentase obat yang memenuhi syarat	83.60%	100%	119,62%	Sangat Baik

Tabel 3.4 Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau TW 1 tahun 2021



Grafik 3.1 Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau TW I tahun 2021

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan.

1. pemenuhan prioritas sampling yang disebabkan oleh keterbatasan ketersediaan produk (jenis dan jumlah) di sarana.
2. Metode sampling acak yang dilakukan memungkinkan keterulangan sampling, karena terbatasnya jumlah peredaran obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau.



3. Obat dengan penanganan khusus seperti penyimpanan pada suhu 2-8 C beresiko untuk dilakukan sampling, karena pengujian dilakukan di balai koordinator (Balai Besar POM di Palembang yang memerlukan waktu tempuh 10 jam dari Loka POM di Kota Lubuklinggau.

b. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Obat yang memenuhi syarat, antara lain :

1. Peningkatan kemampuan kompetensi Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam pelaksanaan sampling.
2. Sampel yang disampling di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau dikhususkan untuk sampel yang tidak beresiko rusak saat pengiriman
3. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang secara rutin dilaksanakan untuk melihat sekaligus memberikan pembinaan dalam penjaminan mutu produk obat dan makanan yang diproduksi dan diedarkan

B. Presentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Indikator kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat menggunakan rumus sebagai berikut:

% Makanan MS =

$$\frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Kriteria Kriteria, target produk makanan yang disampling dan diperiksa mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan
2. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian
3. Sampel yang dihitung sebagai capaian target adalah sampel yang diambil sesuai dengan catchment area
4. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan
5. Loka POM di Kota Lubuklinggau yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri, sehingga pengujian dilaksanakan oleh balai koordinator

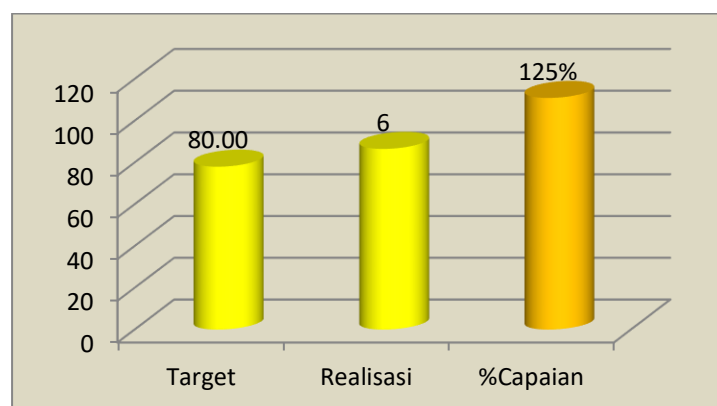


Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
2. Produk kadaluarsa
3. Produk rusak
4. Tidak memenuhi ketentuan label
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW 1-2021	REALISASI TW 1-2021	CAPAIAN TW 1-2021	KRITERIA
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80.00%	100%	125%	Tidak dapat disimpulkan

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat
TW 1 Tahun 2021



Grafik 3.2 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat
TW I Tahun 2021

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

1. Semakin cerdasnya masyarakat dalam memilih/ mengkonsumsi produk pangan yang aman, sehingga peredaran produk pangan yang berbahaya di pasaran dapat ditekan.
2. pemenuhan prioritas sampling yang disebabkan oleh keterbatasan ketersediaan produk (jenis dan jumlah) di sarana.

3. Metode sampling acak yang dilakukan memungkinkan keterulangan sampling, karena terbatasnya jumlah peredaran obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau.
4. Obat dengan penanganan khusus seperti penyimpanan pada suhu 2-8 C beresiko untuk dilakukan sampling, karena pengujian dilakukan di balai koordinator (Balai Besar POM di Palembang yang memerlukan waktu tempuh 10 jam dari Loka POM di Kota Lubuklinggau.
5. Rendahnya persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hal ini dikarenakan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri, sehingga pengujian dilaksanakan oleh balai koordinator.

b. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.

1. Peningkatan kemampuan kompetensi Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam pelaksanaan sampling.
2. Sampel yang disampling di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau dikhususkan untuk sampel yang tidak beresiko rusak saat pengiriman
3. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang secara rutin dilaksanakan untuk melihat sekaligus memberikan pembinaan dalam penjaminan mutu produk obat dan makanan yang diproduksi dan diedarkan

C. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan menggunakan rumus sbb:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan
2. Sampel obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling, sampel obat sesuai dengan catchment area
3. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP



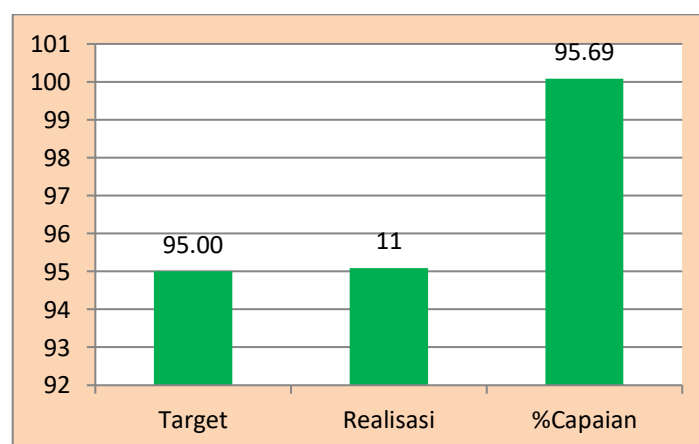
4. Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.
5. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label
6. Loka POM di Kota Lubuklinggau yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri, sehingga pengujian dilaksanakan oleh balai koordinator

Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
2. Produk kadaluarsa
3. Produk rusak
4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW 1-2021	REALISASI TW 1-2021	CAPAIAN TW-1 2021	KRITERIA
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,00%	90,91%	95,69%	Baik

Tabel 3.6 Capaian kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan TW I tahun 2021



Grafik 3.3 Capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan TW I tahun 2021



a. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan.**

1. pemenuhan prioritas sampling yang disebabkan oleh keterbatasan ketersediaan produk (jenis dan jumlah) di sarana.
2. Kemampuan kompetensi pelaksanaan sampling petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau yang terus ditingkatkan
3. Belum semua sarana penjual obat tradisional terdata untuk dilakukan sampling, terutama yang berjualan di malam hari
4. Pengawasan terhadap produk Obat di sarana produksi dan sarana distribusi yang selalu dilaksanakan secara rutin untuk dapat mendeteksi adanya produk suplemen kesehatan yang tidak memenuhi syarat beredar di masyarakat dan di tempat produksi (hulu).

b. **Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Obat yang memenuhi syarat, antara lain :

1. Peningkatan kemampuan kompetensi Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam pelaksanaan sampling.
2. Penyebaran informasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat ataupun pihak sarana terkait obat dan makanan
3. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang secara rutin dilaksanakan untuk melihat sekaligus memberikan pembinaan dalam penjaminan mutu produk obat dan makanan yang diproduksi dan diedarkan

D. Presentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan menggunakan rumus sebagai berikut:

% Makanan MS =

$$\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Kriteria Kriteria, target produk makanan yang disampling dan diperiksa mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan



2. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian
3. Sampel yang dihitung sebagai capaian target adalah sampel yang diambil sesuai dengan catchment area
4. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan
5. Loka POM di Kota Lubuklinggau yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri, sehingga pengujian dilaksanakan oleh balai koordinator

Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
2. Produk kedaluwarsa
3. Produk rusak
4. Tidak memenuhi ketentuan label
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

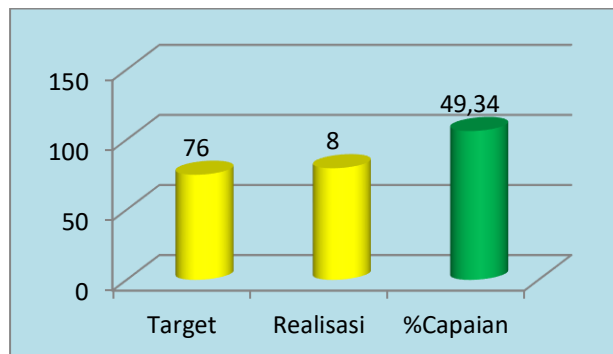
Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.

Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW 1-2021	REALISASI TW 1-2021	CAPAIAN TW 1-2021	KRITERIA
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76.00%	37.50%	49.34%	Sangat Kurang

e

ITabel 3.7. Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan TW 1 Tahun 2021



Grafik 3.4 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan TW I Tahun 2021

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan.

1. Rendahnya persentase makanan yang aman dan bermutu, Hal ini dimungkinkan karena sampel tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian dan kurangnya pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan.
2. Semakin cerdasnya masyarakat dalam memilih/ mengkonsumsi produk pangan yang aman, sehingga peredaran produk pangan yang berbahaya di pasaran dapat ditekan.

b. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Peningkatan kemampuan kompetensi Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam pelaksanaan sampling.
2. Penyebaran informasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat ataupun pihak sarana terkait obat dan makanan
3. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang secara rutin dilaksanakan untuk melihat sekaligus memberikan pembinaan dalam penjaminan mutu produk obat dan makanan yang diproduksi dan diedarkan
4. Memperluas KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau

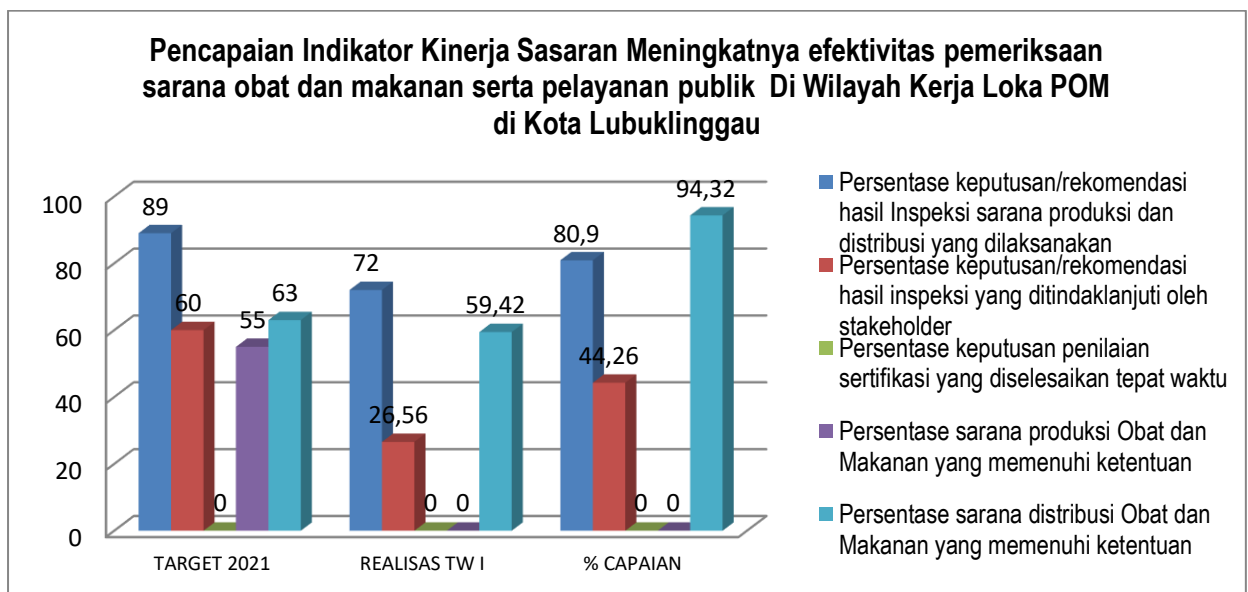
3.3 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN II

2. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN SARANA OBAT DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KERJA LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 5 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 43,90% dengan kriteria **Sangat Kurang**. Hasil pencapaian ditampilkan pada tabel dibawah ini :

N O	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW 1-2021	REALISAS TW I-2021	CAPAIAN TW 1-2021	KATEGORI
1.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89%	72%	80,90%	Cukup
2.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	60%	26,56%	44,26	Sangat Kurang
3.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88%	0%	0%	Sangat Kurang
4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55%	0%	0%	Sangat Kurang
5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63%	59,42%	94,32%	Cukup
RATA-RATA				43,90%	Sangat kurang

Tabel 3.8 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik Di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau



Grafik 3.5 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik Di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau

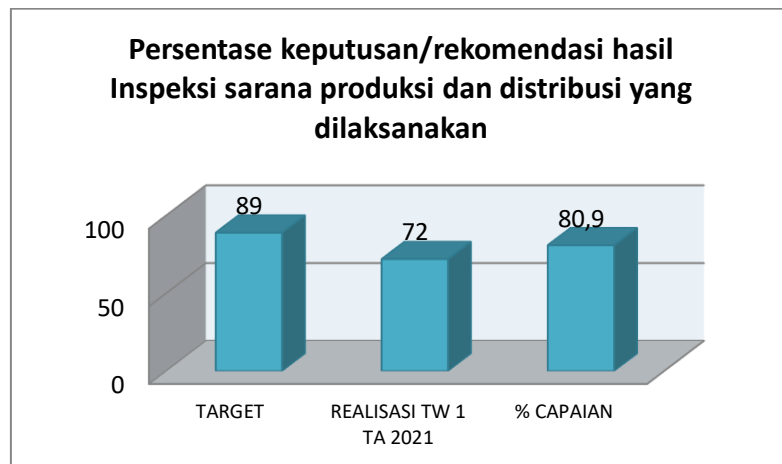
Penjelasan mengenai capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ini diuraikan sebagai berikut:

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

a. Perbandingan Realisasi dan Target di Rencana Kerja 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW 1- 2021	REALISASI TW 1 TA 2021	CAPAIAN TW 1- 2021	KATEGORI
1.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89%	72%	80,90%	Cukup

Tabel 3.9 Capaian indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada TW 1 Tahun 2021



Grafik 3.6 Perbandingan Realisasi dan Target TW I 2021 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Loka POM di Kota dengan target 89%, dengan realisasi sebesar 72,00% dan pencapaian sebesar 80,90% dengan kriteria “cukup”. Dari data tersebut, belum semua hasil pemeriksaan sarana telah ditindaklanjuti, hal ini harus terus ditingkatkan pada TW II.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Terbatasnya akses dalam penyampaian tindak lanjut kepada sarana dikarenakan belum ada PIC terkait pengiriman surat tindak lanjut. Akan dilakukan penunjukan PIC terkait pengiriman surat tindak lanjut ke sarana.
2. Kompetensi petugas yang masih belum merata dalam pembuatan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian surat tindak lanjut. Dalam hal ini telah disiapkan template terkait ketidak sesuaian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan dapat mempercepat proses pembuatan surat tindak lanjut.
3. Kurangnya kontrol terhadap pembuatan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana, sehingga ada hasil pemeriksaan yang belum dikirimkan tindak lanjutnya. Telah dibuatkan sistem kontrol untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan melalui website namun belum sepenuhnya berjalan, untuk kedepannya akan dilakukan penunjukan PIC terkait sistem kontrol tindak lanjut hasil pemeriksaan.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

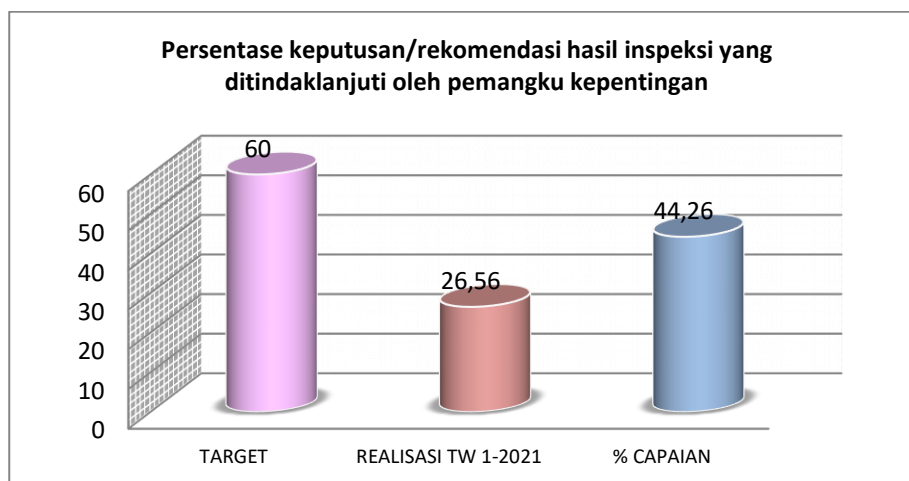
1. Dilakukan desiminasi pelatihan terkait pemeriksaan sarana atau materi-materi tentang pengawasan, sehingga kompetensi petugas dapat ditingkatkan.
2. Mengikuti pelatihan terkait pengawasan obat dan makanan sehingga dapat meningkatkan kompetensi dalam melakukan pengawasan dan membuat tindak lanjut hasil pemeriksaan.

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

a. Perbandingan Realisasi TW 1 TA 2021 dan Target di Rencana Kerja 2021

N O	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW 1-2021	REALISASI TW 1-2021	CAPAIAN TW 1-2021	KATEGORI
1.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60%	26,56%	44,26%	Sangat Kurang

Tabel 3.10 Capaian indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Tahun 2021



Grafik 3.6 Perbandingan Realisasi dan Target TW I 2021 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau dengan target 60%, namun realisasi 26,56% dan pencapaian sebesar 44,26% dengan kriteria “sangat



kurang". Dari hasil realisasi tahun 2021, terlihat feedback dari pemangku kepentingan sangat kurang dari target yang ditetapkan akan dilakukan pendekatan kepada pemangku kepentingan untuk merespon peningkatan sehingga setiap tindak lanjut yang diberikan dapat ditindaklanjuti oleh sarana dan stakeholder.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Kondisi wilayah Provinsi Sumatera Selatan khususnya dan Indonesia pada umumnya, dimana masih dilanda wabah Covid-19 yang makin meluas dan terdapat target vaksinasi pada masing-masing wilayah sehingga terhambatnya proses tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan sarana yang disampaikan. Keterbatasan akses dan adanya tupoksi lain yang lebih penting dari pemangku kepentingan, sehingga respon tindak lanjut belum diutamakan.
2. Anggaran pemerintah daerah hanya terdapat alokasi anggaran untuk sarana produksi saja dan jumlahnya masih tidak mencukupi untuk pengawasan OMKA di pemerintah daerah kab/kota.
3. Kompetensi SDM di masing-masing pemerintah daerah yang masih kurang dalam pengawasan OMKA
4. Kepatuhan pelaku usaha dalam menindaklanjuti sanksi yang diberikan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau masih kurang. Kedepan akan disampaikan peringatan apabila pelaku usaha tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pemeriksaan.
5. Terus dilakukan komunikasi dengan lintas sektor terkait maupun pelaku usaha agar segera menindaklanjuti dan merespon tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana yang telah diberikan. Dalam hal ini, telah dibuat jaringan komunikasi yang berisi perwakilan dari masing-masing lintas sektor sehingga respon bisa lebih cepat.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Adanya aplikasi SMART POM yang sejatinya digunakan untuk mempercepat proses tindak lanjut hasil pemeriksaan, namun belum semua kabupaten/kota telah aktif menggunakan aplikasi SMART POM sehingga penggunaan aplikasi menjadi belum optimal.
2. Pemeriksaan yang dilakukan, selain untuk melihat kesesuaian penerapan peraturan yang berlaku, juga sekaligus melakukan pembinaan guna mengingatkan

stakeholder untuk melakukan perbaikan/ merespon surat tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disampaikan.

3. Pengawasan bersama di sarana distribusi obat dan makanan yang dilakukan, dimana setiap pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OMKA di luar ibukota Provinsi didampingi oleh petugas dari instansi pembina yang ada di kabupaten/kota terkait.

3. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

a. Perbandingan Target TW 1-2021 dengan Realisasi TW 1-2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW 1-2021	REALISASI TW 1-2021	CAPAIAN TW 1-2021	KATEGORI
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88%	0%	0%	Sangat Kurang

Tabel 3.11 Capaian indikator kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu TW I Tahun 2021

Pada TW 1 tidak terdapat target persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu. Pada TW 1 dilakukan pembinaan terhadap sarana yang ingin mengajukan pemeriksaan sarana dalam rangka pendaftaran izin edar pangan olahan dan juga sarana yang mengajukan sertifikasi CDOB.

4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

a. Perbandingan Realisasi 2021 Dengan Target 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW 1- 2021	REALISASI TW 1-2021	CAPAIAN TW 1-2021	KATEGORI
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55%	0%	0%	Sangat kurang

Tabel 3.12 Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan TW 1 Tahun 2021 Terhadap Target 2021.

Pada TW 1 tahun 2021, jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan 13 sarana Industri Rumah Tangga Pangan dari 35 target



jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa.

Capaian indikator kinerja Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2021 terhadap target tahun 2021 sebesar 0% (Sangat Kurang). Walaupun pengawasan sarana produksi telah dilakukan berdasarkan analisis risiko namun tingkat kepatuhan pelaku usaha masih rendah dikarenakan sanksi yang diberikan masih ringan dan belum adanya kesadaran dari pelaku usaha untuk mengikuti peraturan, terutama dalam hal penerapan aspek-aspek CPPOB-IRTP dalam hal sanitasi dan higiene yang tidak konsisten dilakukan, tidak mencantumkan nomor batch dan kadaluarsa produk, serta tidak memiliki dokumen produksi

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Kondisi geografis dan persebaran sarana produksi obat dan makanan di wilayah pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau 5 kab/kota yang terdiri dari jarak tempuh 1 - 6 jam perjalanan dengan mobil yang medan jalan yang dilalui tidak mudah.
2. Jumlah sarana produksi (PIRT) yang banyak sehingga belum seluruhnya dapat dilakukan pemeriksaan dan pembinaan untuk memenuhi ketentuan CPPOB-IRTP.
3. Pemeriksaan sarana dilakukan berdasarkan analisis risiko dan sarana baru atau sarana yang telah lama tidak diperiksa. Hal ini menyebabkan sarana dengan nilai risiko tinggi dan sarana baru yang belum pernah mendapatkan pembinaan memiliki peluang tidak memenuhi ketentuan meningkat. Selain itu, pemeriksaan sarana yang dilakukan, tidak bisa menjamin bahwa suatu sarana memiliki kepatuhan yang baik/ memenuhi ketentuan pada saat dilakukan pemeriksaan.
4. Tools pemeriksaan sarana IRTP yang digunakan berdasarkan tools yang dikeluarkan oleh pusat tidak bisa dipenuhi secara lengkap oleh pelaku usaha/ pihak sarana, sehingga hasil pemeriksaan selalu tidak memenuhi ketentuan. Perlu dibuat tools baru yang dapat mengklasifikasikan jenis-jenis IRTP.
5. Kualitas dan kuantitas SDM terkait pengawasan sarana produksi obat dan makanan masih belum mengcover jumlah sarana yang ada.
6. Kepatuhan pelaku usaha dalam melakukan perbaikan dan pemenuhan persyaratan pengolahan pangan masih rendah. Terkait dengan hal ini, telah dibuat jaringan komunikasi yang digunakan untuk mengingatkan stake holder



untuk menyampaikan pada pelaku usaha agar memperbaiki hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

7. Dana alokasi khusus (DAK) yang telah diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota diharapkan dapat meningkatkan jumlah pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha IRTP, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Pelaksanaan Kegiatan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang menunjang Pengawasan Sarana Produksi:
 - ✓ Pelatihan-pelatihan terkait pengawasan sarana produksi yang diikuti sehingga meningkatkan kompetensi SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau.
 - ✓ KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau kepada pelaku usaha sehingga meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
 - ✓ Pemeriksaan rutin terhadap sarana produksi makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau, dimana setiap pemeriksaan sarana produksi makanan di luar kota didampingi oleh petugas dari instansi terkait yang ada di kabupaten/kota terkait.
2. Belum terlaksananya kegiatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/ Kota, sehingga pembinaan belum dapat dilakukan kepada pelaku usaha, terutama untuk industri rumah tangga pangan (IRTP).

d. Evaluasi dan Analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

1. Pengawasan sarana produksi telah dilakukan berdasarkan analisis risiko namun tingkat kepatuhan pelaku usaha masih rendah dikarenakan sanksi yang diberikan masih ringan dan belum adanya kesadaran dari pelaku usaha untuk mengikuti peraturan.
2. Aplikasi SMART POM yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau, namun belum sepenuhnya aktif digunakan.

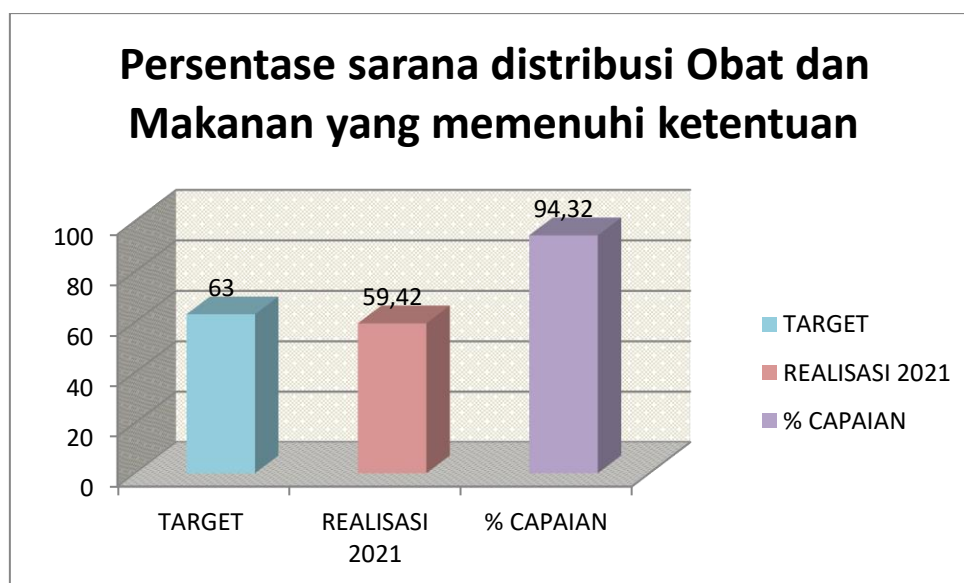
5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan



a. Perbandingan Realisasi 2021 Dengan Target 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW 1-2021	REALISASI TW 1-2021	CAPAIAN TW 1-2021	KRITERIA
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%	61,43%	97,51%	Baik

Tabel 3.13 Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan TW 1 Tahun 2021 Terhadap Target 2021.



Grafik 3.7 Capaian indikator kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan TW 1 tahun 2021 terhadap target 2021

Sarana yang diperiksa adalah seluruh sarana distribusi obat dan makana. Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada tindak lanjut temuan berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin. Pada tahun 2021, jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan 43 sarana dari 70 jumlah sarana distribusi yang diperiksa.

Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau pada tahun 2021 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 94,32% dengan kriteria “cukup”.



Hal ini menunjukkan belum sepenuhnya pelaku usaha patuh terhadap peraturan yang berlaku.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Kondisi geografis dan persebaran sarana distribusi obat dan makanan di wilayah pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam 5 kab/kota yang terdiri dari daratan dengan jarak tempuh 1 - 6 jam perjalanan dengan mobil yang transportasinya tidak mudah.
2. Jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang banyak sehingga tidak seluruhnya tercover dalam pemeriksaan obat dan makanan.
3. Kualitas dan kuantitas SDM terkait pengawasan sarana distribusi obat dan makanan masih belum mengcover seluruh sarana yang ada.
4. Pemeriksaan sarana dilakukan berdasarkan analisis risiko dan sarana baru atau sarana yang telah lama tidak diperiksa. Hal ini menyebabkan sarana dengan nilai risiko tinggi dan sarana baru yang belum pernah mendapatkan pembinaan memiliki peluang tidak memenuhi ketentuan meningkat. Selain itu, pemeriksaan sarana yang dilakukan, tidak bisa menjamin bahwa suatu sarana memiliki kepatuhan yang baik/ memenuhi ketentuan pada saat dilakukan pemeriksaan.
5. Kepatuhan pelaku usaha dalam melakukan perbaikan terhadap hasil pemeriksaan masih rendah, sehingga temuan yang sama dapat terulang pada pemeriksaan berikutnya.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Pelaksanaan Kegiatan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang menunjang Pengawasan Sarana Produksi OMKA :
 - ✓ Pelatihan-pelatihan terkait pengawasan sarana distribusi OMKA yang diikuti sehingga meningkatkan kompetensi SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau.
 - ✓ KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau kepada pelaku usaha sehingga meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

- ✓ Pemeriksaan rutin terhadap sarana distribusi OMKA di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau, dimana setiap pemeriksaan sarana distribusi OMKA di luar kota didampingi oleh petugas dari instansi pembina yang ada di kabupaten/kota terkait
 - ✓ Adanya jaringan komunikasi, baik dengan lintas sektor ataupun penanggung jawab sarana sehingga dapat dijadikan media konsultasi dan KIE terkait obat dan makanan.
2. Dana alokasi khusus (DAK) yang seyogyanya digunakan dalam pembinaan dan pengawasan obat dan makanan oleh instansi terkait, belum dapat digunakan karena adanya intensifikasi vaksinasi.

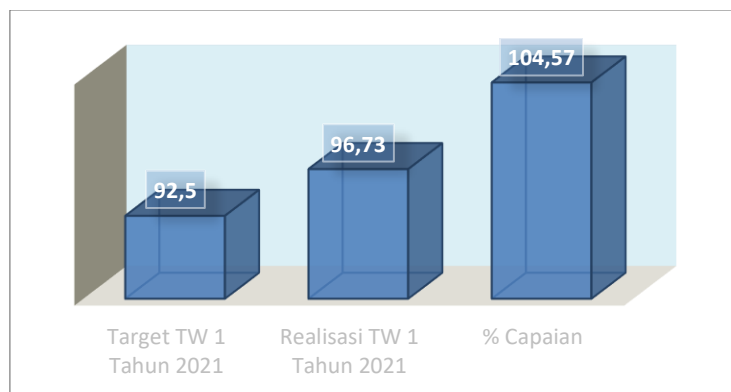
3.4 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN III

3. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI (KIE) OBAT DAN MAKANAN

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 indikator kinerja utama. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dihitung mulai triwulan I sampai dengan triwulan IV dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW 1-2021	REALISASI TW 1-2021	CAPAIAN TW-1 2021	KATEGORI
1.	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	92,50%	96,73%	104,57%	Baik

Tabel 3.14. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan V



Grafik 3.8 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan TW I Tahun 2021



Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi :

- KIE melalui media cetak dan elektronik;
- KIE langsung ke masyarakat; dan
- KIE melalui media sosial.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria :

1. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
3. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
4. Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

Responden survey efektifitas KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei menggunakan online survey melalui evaluasi.kie.pom.go.id. Pada tahun 2020, frekuensi target dan capaian dihitung setiap triwulan untuk indikator 'Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Loka POM di Kota Lubuklinggau'.

Pada triwulan I Tahun 2021, Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan 6 (enam) kali kegiatan KIE yaitu 1 (satu) kali KIE melalui media luar ruang (billboard), 1 (satu) kali Penyebaran Informasi kepada pelaku usaha kopi di Kabupaten Lahat, 3 (tiga) kali Penyebaran Informasi kepada pelaku usaha yaitu pedagang Pasar Tradisional di Kota Lubuklinggau dan KIE melalui media sosial dengan 39 (tiga puluh Sembilan) infografis dan 5 (lima) video.

- a. Keberhasilan pencapaian kinerja 'Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif' disebabkan oleh :
 - Pelaksanaan KIE sudah diupayakan untuk menyentuh seluruh lapisan masyarakat dari golongan usia maupun pekerjaan dengan dilakukannya



KIE melalui media sosial (Instagram, Facebook, Twitter dan Youtube) dan juga KIE melalui media luar ruang.

- Pelaksanaan KIE dilakukan langsung ke pelaku usaha yaitu pelaku usaha kopi di Kabupaten Lahat dan juga pedagang pasar tradisional di Kota Lubuklinggau.

b. Hambatan pelaksanaan program diantaranya :

- Wilayah pengawasan yang cukup luas sehingga belum semua daerah bisa terjangkau untuk diberikan KIE secara tatap muka.

c. Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- Meningkatkan intensitas KIE secara online di media sosial baik berupa infografis, video maupun konten interaktif lainnya;
- Meningkatkan variasi konten mengenai obat dan makanan yang dapat diterima pada seluruh lapisan masyarakat; dan

Menjalin komunikasi dengan media lokal terkait pemberitaan seputar kegiatan Loka POM di Kota Lubuklinggau.

3.5 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN IV

4. MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 2 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 108,63% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW 1- 2021	REALISA SI TW 1- 2021	CAPAIA N TW1- 2021	KATEGORI
1.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	12,80%	102,37%	Sangat Baik



2.	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	14,36%	114,89%	Sangat Baik
RATA-RATA				108.63%	Sangat Baik

Tabel 3.15. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan I Triwulan 1 tahun 2021

Penjelasan mengenai capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-IV sebagai berikut :

A. Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator kinerja Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar =

$$\frac{(A + B)}{2} \times 100\%$$

Di mana:

A = (Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar / Jumlah target sampel Obat) x 100%

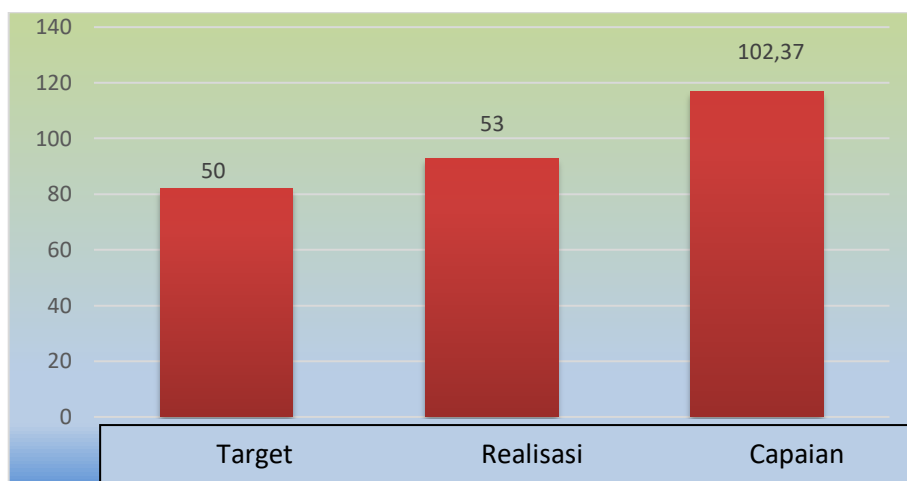
B = (Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar / Jumlah target sampel Obat) x 100%

Yang dimaksud Obat di sini mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling, sedangkan sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP.

Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW 1	REALISASI TW 1	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	12,80%	102,37%	Sangat Baik

Tabel 3.16. Capaian indikator kinerja Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar TW 1 Tahun 2021



Grafik 3.9.Capaian indikator kinerja Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar TW I Tahun 2021

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

2. Kuantitas dan Kualitas SDM yang melakukan sampling, Kualitas dan kuantitas SDM mulai dari yang melakukan sampling sesuai Pedoman Sampling sampai kepada kemampuan/kompetensi petugas sangat berpengaruh pada pencapaian ini
3. Semakin meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan suatu produk dapat beredar di pasaran

e. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Koordinasi antara Loka POM di Kota Lubuklinggau dengan Balai Koordinator terkait perencanaan sampling yang semakin baik.
2. Peningkatan kepatuhan terhadap prioritas sampling serta sampling yang lebih variatif.
3. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang secara rutin dilakukan, selain memeriksa kesesuaian dalam penerapan peraturan yang berlaku, juga memberikan pembinaan terkait pemenuhan persyaratan produk yang boleh beredar.

e. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

1. Peningkatan kemampuan SDM petugas sampling
2. Peningkatan pengawasan dan tindak lanjut terhadap produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan, baik dengan cara dikembalikan ke produsen



ataupun dimusnahkan, sehingga produk yang beredar merupakan produk yang aman dan bermutu.

B. Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator kinerja Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar =

$$\frac{(A + B)}{2} \times 100\%$$

Di mana:

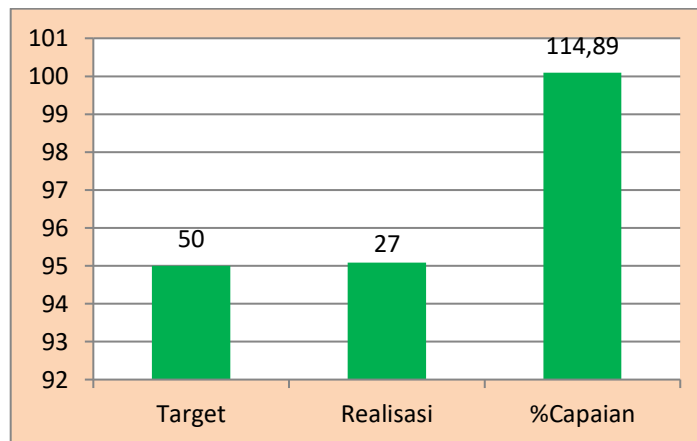
A = (Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar / Jumlah target sampel Makanan) x 100%

B = (Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar / Jumlah target sampel Makanan) x 100%

Yang dimaksud Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, sedangkan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW 1-2021	REALISASI TW 1-2021	CAPAIAN TW 1- 2021	KATEGORI
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	14,36%	114,89%	Sangat Baik

Tabel 3.17. Capaian indikator kinerja Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar TW 1 Tahun 2021



Grafik 3.10.Capaian indikator kinerja Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar TW I Tahun 2021

f. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

1. Kuantitas dan Kualitas SDM yang melakukan sampling, Kualitas dan kuantitas SDM mulai dari yang melakukan sampling sesuai Pedoman Sampling sampai kepada kemampuan/kompetensi petugas sangat berpengaruh pada pencapaian ini
2. Semakin meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan suatu produk dapat beredar di pasaran

g. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Koordinasi antara Loka POM di Kota Lubuklinggau dengan Balai Koordinator terkait perencanaan sampling yang semakin baik.
2. Peningkatan kepatuhan terhadap prioritas sampling serta sampling yang lebih variatif.
3. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang secara rutin dilakukan, selain memeriksa kesesuaian dalam penerapan peraturan yang berlaku, juga memberikan pembinaan terkait pemenuhan persyaratan produk yang boleh beredar.

f. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.



1. Peningkatan kemampuan SDM petugas sampling Peningkatan pengawasan dan tindak lanjut terhadap produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan, baik dengan cara dikembalikan ke produsen ataupun dimusnahkan, sehingga produk yang beredar merupakan produk yang aman dan bermutu

3.6 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN V

5. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

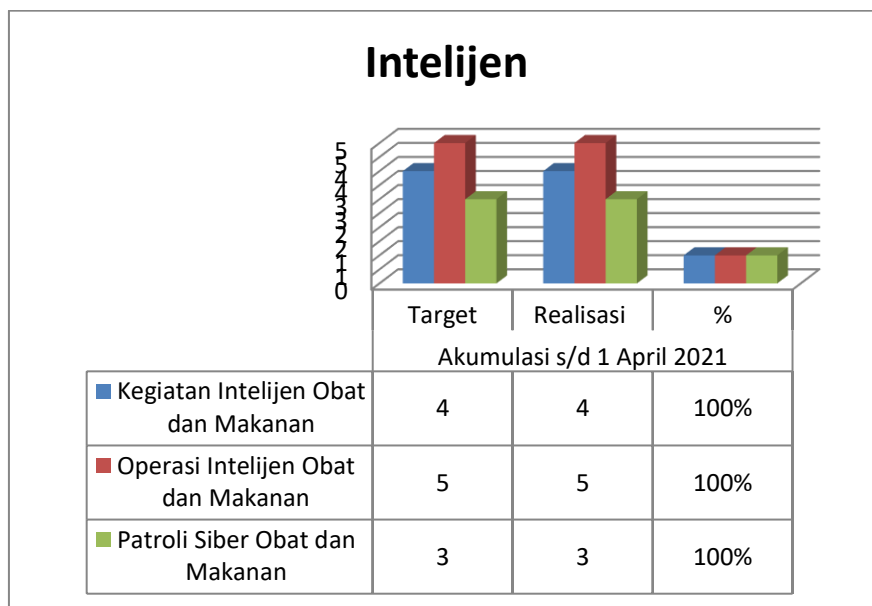
INDIKATOR KINERJA	TARGET TW 1- 2021	REALISASI TW 1-2021	CAPAIAN TW 1- 2021	KATEGORI
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	15%	0%	0%	Sangat Kurang

Tabel 3.18 Capaian indikator kinerja Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan TW I Tahun 2021

Indikator kinerja di fungsi Penindakan bernilai 'Sangat Kurang'. Pada triwulan I Tahun 2021, fungsi Penindakan Loka POM di Kota Lubuklinggau belum melakukan penindakan dan penyidikan dikarenakan target operasi tindak pidana obat dan makanan masih dalam proses intelijen. Namun sesuai dengan rencana pelaksanaan tahunan, kegiatan penindakan dan penyidikan akan dilaksanakan pada triwulan II Tahun 2021.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2021

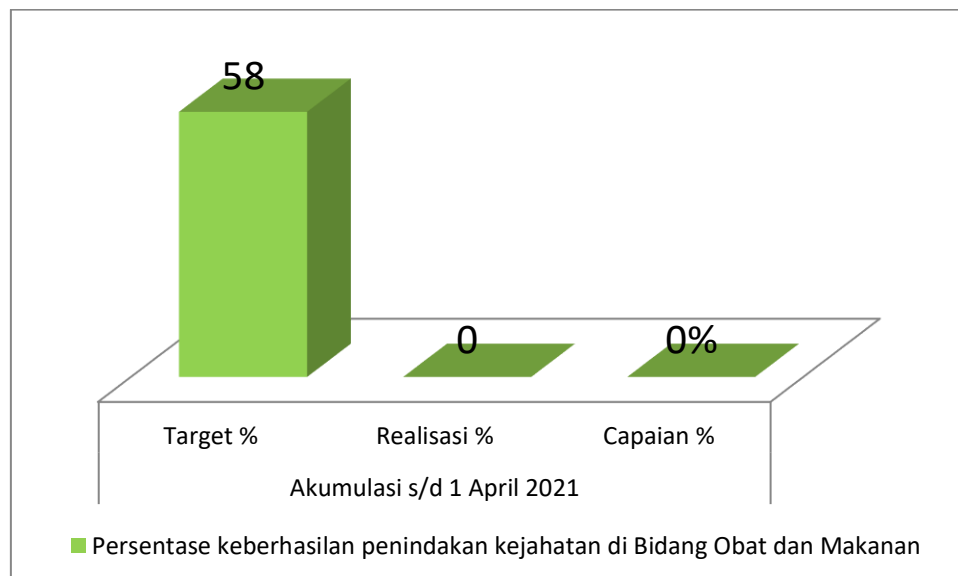
Tingkat Perbandingan Target dengan Realisasi keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau selama triwulan I tahun 2021 jika dilihat dari sudut pandang **intelijen** adalah 100% dari rencana pelaksanaan tahunan maupun bulanan sehingga capaian intelijen yang diperoleh pada triwulan I tahun 2021 bernilai dengan kriteria baik.



Grafik 3.11 Capaian perbandingan target dan realiasi intelijen tindak pidana kejahatan di bidang Obat dan Makanan TW I Tahun 2021

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan 1 terhadap Target Tahun 2021

Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan triwulan I adalah 0%, maka capaian terhadap target Penindakan dan Penyidikan sampai triwulan I adalah sebesar 0%.



Grafik 3.12 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi TW I 2021

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan



Tercapainya capaian kinerja pada triwulan I disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Adanya kerjasama yang baik antar lintas sektor Kota/Kabupaten sehingga realisasi kegiatan intelijen berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga kemudian kegiatan penindakan dan penyidikan dapat terealisasi pada triwulan II tahun 2021.
- b. Adanya komunikasi yang baik antar fungsi di Loka POM di Kota Lubuklinggau, dimana fungsi Infokom dan fungsi Pemeriksaan Sarana terus memberikan informasi/ laporan baik dari hasil Pemeriksaan rutin maupun dari laporan masyarakat ke fungsi Penindakan terkait dugaan kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Namun, dalam mencapai kinerja selama TW I tahun 2021, Loka POM di Kota Lubuklinggau masih menemukan kendala sebagai berikut:

- a. Pelaku kejahatan semakin pintar untuk menyembunyikan barang bukti;
- b. Pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan di dunia maya sulit untuk ditelusuri baik lokasi maupun barang bukti;
- c. Terbatasnya alat intelijen untuk mendeteksi dimana lokasi pelaku kejahatan.
- d. Keterbatasan kemampuan intelijen untuk menemukan target pelaku kejahatan dikarenakan anggota fungsi Penindakan Loka yang tergolong masih sangat baru di dunia intelijen dan belum pernah mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan kegiatan intelijen.

2. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tercapainya target kinerja fungsi Penindakan disebabkan oleh upaya fungsi penindakan yang terus meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan rencana kegiatan yang telah dibuat sebelumnya, yaitu:

- a. Perencanaan kegiatan intelijen atau investigasi yang telah disusun per bulan dilaksanakan secara intensif.
- b. Perencanaan kegiatan penindakan dan penyidikan yang telah direncanakan diupayakan untuk dilaksanakan.

3. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.



- a. Koordinasi dan Kerjasama yang baik antar lintas sektor dapat membantu meningkatkan kinerja fungsi Penindakan, sehingga Loka POM di Kota Lubuklinggau terus berupaya untuk menjalin kerjasama yang baik.
- b. Koordinasi dengan lintas sektor terkait (Korwas, Kejari, dan Pengadilan) harus tetap dilaksanakan agar terjalinnya komunikasi dan kerjasama yang baik.
- c. Koordinasi dengan Bidang Penindakan BBPOM di Palembang (PPNS Bidang Penindakan BBPOM di Palembang) harus tetap dilaksanakan agar terjalinnya komunikasi dan kerjasama yang baik sehingga dapat bersinergi pada saat akan dilakukannya kegiatan Penindakan dan Penyidikan.
- d. Perencanaan kegiatan intelijen dan kegiatan operasi penindakan yang matang diperlukan untuk dapat memenuhi target jumlah perkara yang akan diproses Pro Justitia maupun Non Justitia oleh PPNS Loka POM di Kota Lubuklinggau.
- e. Patroli siber tetap harus dilakukan secara rutin sejalan dengan dibentuknya Direktorat Patroli Siber.
- f. Upaya cegah tangkal tetap harus dikedepankan sejalan dengan Paradigma baru kedeputan 4 (empat) yang mengisyaratkan bahwa Penindakan dan Penyidikan sebagai *Ultimatum Remedium* atau sebagai langkah terakhir .

3.7 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VI

6. TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU YANG OPTIMAL

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW 1-2021	REALISASI TW 1-2021	CAPAIAN TW 1-2021	KATEGORI
1.	Implementasi Rencana Aksi RB di lingkup UPT	25,00%	25,00%	100%	Baik
2	Dokumen Ketatausahaan yang di laporkan tepat waktu	25,00%	25,00%	100%	Baik
3	Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	40,00%	40,00%	100%	Baik



RATA-RATA	100%	Baik
-----------	------	------

Tabel 3.19 Capaian Indikator Kinerja Sasaran VI Kegiatan Triwulan I Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW 1-2021	REALISASI TW 1-2021	CAPAIAN TW 1-2021	KATEGORI
1.	Implementasi Rencana Aksi RB di lingkup UPT	25,00%	25,00%	100%	Baik

Tabel 3.20 Capaian Indikator Kinerja Implementasi Rencana Aksi RB di lingkup UPT Triwulan I Tahun 2021

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

- Membuat Planning terkait dengan implementasi rencana aksi RB Loka POM di Kota Lubuklinggau.

2. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Adanya pembuatan pohon inovasi yang berisi inovasi dari masing-masing bagian maupun individu yang diharapkan bisa mendukung reformasi birokrasi yang ada di UPT Loka POM di Kota Lubuklinggau

3. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

- Mendorong peran Agen Perubahan serta seluruh pegawai untuk menciptakan inovasi sebagai solusi dari permasalahan di Loka POM di Kota Lubuklinggau.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW 1-2021	REALISASI TW 1-2021	CAPAIAN TW 1-2021	KATEGORI
1.	Dokumen Ketatausahaan yang di laporkan tepat waktu	25,00%	25,00%	100%	Baik

Tabel 3.21 Capaian Indikator Kinerja Dokumen Ketatausahaan yang di laporkan tepat waktu Triwulan I Tahun 2021



1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

- Pelaporan dokumen ketatausahaan telah dilaporkan dengan baik sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan.
- Dokumen
Jumlah dokumen ketatausahaan yang disusun:
 1. Laporan SKP Per Triwulan
 2. Laporan Disiplin per bulan dan per triwulan
 3. Laporan Gratifikasi/benturan kepentingan/WBS per triwulan
 4. Laporan BMN per Semester
 5. Laporan kehadiran Upacara
 6. Laporan daftar Arsip Aktif Per Semester
 7. Pengisian Monev Online
 8. LHKPN / LHKASN
 9. Laporan PBJ ke Inspektorat per triwulan

2. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Melakukan monitoring untuk dokumen ketatausahaan yang berisi batas akhir untuk masing-masing dokumen.
- Membentuk penanggung jawab untuk masing-masing dokumen ketatausahaan untuk mempercepat pelaporan.

3. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

- Meningkatkan konsistensi masing-masing penanggung jawab dalam melakukan pelaporan dokumen ketatausahaan.
- Perlu disediakan media untuk berbagi data untuk keperluan tindak lanjut permintaan data antar bagian untuk pengisian setiap dokumen agar meningkatkan efektifitas dalam penyusunan dokumen.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW 1-2021	REALISASI TW 1-2021	CAPAIAN TW 1-2021	KATEGORI
1.	Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	40,00%	40,00%	100%	Baik



Tabel 3.22 Capaian Indikator Kinerja Dokumen Ketatausahaan yang di laporkan tepat waktu Triwulan I Tahun 2021

- 1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.**
 - Pembuatan dokumen Perjanjian kinerja, rencana kinerja tahunan dan rencana aksi perjanjian kinerja yang telah dilaksanakan dengan baik.
- 2. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**
 - Melakukan kerja sama antara masing-masing bagian dalam proses pembuatan dokumen.
- 3. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.**
 - Perlu disediakan media untuk berbagi data untuk keperluan tindak lanjut permintaan data antar bagian untuk pengisian setiap dokumen agar meningkatkan efektifitas dalam penyusunan dokumen.

3.8 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VII

7. TERWUJUDNYA SDM LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU YANG BERKINERJA OPTIMAL

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 indikator kinerja utama, yaitu :

A. Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau

Indikator Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau (TW I) :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW 1- 2021	REALISASI TW 1-2021	CAPAIAN TW 1- 2021	KATEGORI
1.	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau	-	-	-	-

Tabel 3.23 Capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau Triwulan 1 2021



Tidak terdapat target untuk pengukuran indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau untuk periode triwulan I dan proses untuk pengukuran indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2021.

3.9 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VIII

8. TERKELOLANYA KEUANGAN LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU SECARA AKUNTABEL

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 81,5% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW 1-2021	REALISASI TW 1-2021	CAPAIAN TW 1-2021	KATEGORI
1.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau	Efisien (92%)	Efisien (75%)	81,52%	Cukup
RATA-RATA				81,52%	Cukup

Tabel 3.24 Capaian indikator kinerja Tingkat Efisiensi Penggunaan Loka POM di Kota Lubuklinggau TW I Tahun 2021

Untuk pengukuran efisiensi suatu kegiatan, fokusnya adalah indikator input dan output kegiatan tersebut. Dalam hal ini, efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang dapat diperoleh dengan menggunakan rumus :
Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

$$\begin{aligned} SE &= \frac{\% \text{ rencana capaian output}}{\% \text{ rencana capaian input}} \\ &= \frac{100\%}{100\%} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi / ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Selanjutnya efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

- ✓ Melakukan optimalisasi anggaran dengan kegiatan yang lebih dari yang ditetapkan sehingga dengan anggaran yang minimal menghasilkan kinerja yang maksimal.
- ✓ Melakukan back to back kegiatan ditempat yang sama dengan hanya menambah waktu sehingga kegiatan yang dihasilkan lebih efektif dan efisien.

2. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- ✓ Konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal perencanaan;

- ✓ Komitmen antara pimpinan dan staf Loka POM di Kota Lubuklinggau untuk melaksanakan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan sebaik mungkin sesuai anggaran yang tercantum dalam DIPA Loka POM di Kota Lubuklinggau;
- ✓ Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran dilakukan secara rutin setiap bulannya.

3. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

- Identifikasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi bermasalah sedini mungkin, disertai dengan alternatif solusi
- Pejabat serta pengelola keuangan lebih teliti dalam melaksanakan pembayaran belanja untuk meminimalkan pengembalian/kesalahan SPM atau retur SP2D

3.10 REALISASI ANGGARAN

JENIS BELANJA	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE REALISASI (%)
Belanja Pegawai	1,848,497,000	295,501,561	15.99
Belanja Barang	1,554,842,000	392,991,502	25.28
Belanja Modal	100,000,000	0	0
Total Belanja	3,503,339,000	688,493,093	19.65

Tabel 3.25 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Triwulan I 2021

No	Indikator	Input (anggaran)		
		T	R	%
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	9.090.667	1.306.667	14,37
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	31.883.667	800.000	2,51
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	9.090.667	1.306.667	14,37
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	31.883.667	800.000	2,51



5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	71.572.333	11.073.963	15,47
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71.572.333	11.073.963	15,47
7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	10.939.000	900.000	8,23
8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	12.446.000	2.336.667	18,77
9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	59.126.333	8.737.296	14,78
10	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	124.000.000	16.516.000	13,32
11	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	9.090.667	1.306.667	14,37
12	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	31.883.667	800.000	2,51
13	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	102.927.000	781.000	0,76
14	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	585.566.600	126.150.841	21,54
15	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	585.566.600	126.150.841	21,54
16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	585.566.600	126.150.841	21,54
17	Indeks Profesionalitas ASN UPT	585.566.600	126.150.841	21,54
18	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	585.566.600	126.150.841	21,54
TOTAL		3.503.339.000	688.493.093	19,65

Tabel 3.26 Realisasi Anggaran Tiap Indikator Kegiatan Triwulan 4 Tahun 2020

Persentase capaian realisasi anggaran tertinggi adalah indikator implementasi rencana aksi RB dilingkup UPT (21,54%), dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu (21,54%), dokumen perjanjian kinerja dan capaian rencana aksi kinerja yang disusun tepat waktu (21,54%), indeks profesionalitas ASN UPT (21,54%) serta tingkat efisiensi penggunaan anggaran UPT(21,54%).Capaian realisasi anggaran terendah adalah untuk indikator kegiatan Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan (0,76%).

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan evaluasi interim triwulan I didasarkan pada perjanjian kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2021 yang memuat 8 sasaran kegiatan dengan 18 indikator kinerja kegiatan.

Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri, terdapat 7 (tujuh) sasaran kegiatan yang dapat dihitung pada triwulan I tahun 2021. 3 (tiga) sasaran mencapai nilai pencapaian sasaran (NPS) "Baik" yaitu sasaran kegiatan 1 (Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau), sasaran kegiatan 3 (Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau), dan sasaran kegiatan 6 (Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal),; terdapat 1 (satu) sasaran kegiatan mencapai nilai pencapaian sasaran (NPS) "Sangat Baik" yaitu sasaran kegiatan 4 (Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau); terdapat 1 (satu) NPS "cukup" yaitu sasaran kegiatan 8 (Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara akuntabel),; serta terdapat 2 (dua) sasaran kegiatan memiliki NPS "Sangat Kurang" yaitu sasaran kegiatan 2 (Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau) dan sasaran kegiatan 5 (Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan makanan di Loka POM di Kota Lubuklinggau). Serta terdapat 1 (satu) sasaran kegiatan (Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berkinerja optimal) capaiannya akan dihitung pada triwulan IV tahun 2021.

Pencapaian realisasi anggaran kegiatan sebesar 19,65% (688.493.093) dari Rp. 3.503.339.000 Anggaran Tahun 2021 Loka POM di Kota Lubuklinggau.

4.2 Saran

1. Dalam rangka peningkatan capaian kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau pada triwulan berikutnya perlu dioptimalkan kinerja kegiatan pada 8 area sasaran kegiatan
2. Melakukan monitoring secara periodic terhadap capaian output, anggaran maupun capaian sasaran kegiatan serta rencana aksi nyata perbaikan atas rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kinerja, agar indikator dapat tercapai di akhir tahun 2021

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. Perjanjian Kerjasama



LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA LUBUKLINGGAU

Jl. Garuda No. 149 Kel. Lubuk Aman Kec. Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau 31614

Telp. (0733) 3285450; 3285590;

email : loka_lubuklinggau@pom.go.id website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA LUBUKLINGGAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Afdil Kurnia, S.Si., Apt

Jabatan : Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA LUBUKLINGGAU

Jl. Garuda No. 149 Kel. Lubuk Aman Kec. Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau 31614

Telp. (0733) 3285450; 3285590;

email : loka_lubuklinggau@pom.go.id website : www.pom.go.id

Lubuklinggau, 21 Desember 2020

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP



Pihak Pertama

Aidil Kurnia, S.Si., Apt

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA LUBUKLINGGAU

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di kota Lubuklinggau	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di kota Lubuklinggau	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di kota	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,50%

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA LUBUKLINGGAU

Jl. Garuda No. 149 Kel. Lubuk Aman Kec. Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau 31614

Telp. (0733) 3285450; 3285590;

email : loka_lubuklinggau@pom.go.id website : www.pom.go.id

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Lubuklinggau		
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di kota Lubuklinggau	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di kota Lubuklinggau wilayah kerja Loka POM di kota Lubuklinggau	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	58%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di kota Lubuklinggau yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di kota Lubuklinggau	100%
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100%
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di kota Lubuklinggau yang	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di kota Lubuklinggau	82%

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA LUBUKLINGGAU

Jl. Garuda No. 149 Kel. Lubuk Aman Kec. Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau 31614

Telp. (0733) 3285450; 3285590;

email : loka_lubuklinggau@pom.go.id website : www.pom.go.id

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	berkinerja optimal		
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di kota Lubuklinggau secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di kota Lubuklinggau	Efisien 92 %

Kegiatan

Anggaran

- | | | | |
|---|--|----|---------------|
| 1 | Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia | Rp | 1,081,142,000 |
| 2 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM | Rp | 2,422,197,000 |

Lubuklinggau, 21 Desember 2020

Kepala Badan POM



Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP

Kepala Loka



Afdikurnia, S.Si., Apt

KEPUTUSAN KEPALA LOKA
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR PR.04.01.133.06.20.184.B TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KINERJA
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA LUBUKLINGGAU
TAHUN 2021
KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KOTA LUBUKLINGGAU

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di kota Lubuklinggau pada tahun 2021 serta tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Nomor HK.02.02.9.96.06.20.1564 Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di kota Lubuklinggau Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di kota Lubuklinggau Tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di kota Lubuklinggau Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2021.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di kota Lubuklinggau Tahun 2021 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu merupakan acuan Loka Pengawas Obat dan Makanan di kota Lubuklinggau dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2021.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Lubuklinggau

Pada tanggal 02 Juni 2020

KEPALA LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU



AEDIL KURNIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA LOKA

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA
LUBUKLINGGAU

NOMOR PR.04.01.06.20.184.B TAHUN 2020

TENTANG

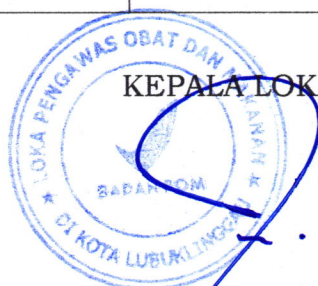
RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI KOTA LUBUKLINGGAU
TAHUN 2021

**RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KOTA LUBUKLINGGAU
TAHUN 2021**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di kota Lubuklinggau	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di kota Lubuklinggau	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat	88%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		waktu	
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di kota Lubuklinggau	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,50%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di kota Lubuklinggau	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di kota Lubuklinggau wilayah kerja Loka POM di kota Lubuklinggau	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	58%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di kota Lubuklinggau yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di kota Lubuklinggau	100%
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di kota Lubuklinggau yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di kota Lubuklinggau	82%
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di kota Lubuklinggau secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di kota Lubuklinggau	Efisien 92 %



KEPALA LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU

(AFDIL KURNIA)

LAMPIRAN 3. Rencana Aksi Perjanjian Kerja

Matriks RAPK

LOKA POM di kota Lubuklinggau tahun 2021 TW I

Sasaran Strategis		Indikator		Target 2021	Target triwulanan (kumulatif)				Reakisasi			Capaian
					s,d TW I (Jan-Mar)	s,d TW II (Jan-Jun)	s,d TW III (Jan-Sept)	s,d TW IV (Jan-Des)	s,d TW I (Jan-Mar)			TW 1
									Pembilang	Penyebut	Realisasi	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60%	83,60%	83,60%	83,60%	83,60%	27	27	100,00%	119,617
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	6	6	100,00%	125
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	10	11	90,91%	95,6938
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,00%	76,00%	76,00%	76,00%	76,00%	3	8	37,50%	49,3421
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00%	89,00%	89,00%	89,00%	89,00%			72,00%	80,8989
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%			26,56%	44,2593

2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88,00%	88,00%	88,00%	88,00%	88,00%	0	0	0,00%	0
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	0	13	0,00%	0
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%	63,00%	63,00%	63,00%	63,00%	41	69	59,42%	94,3179
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	10	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,50	92,50	92,50	92,50	92,50	-	-	-	-
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	11	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	12,50%	25,00%	37,50%	50,00%	54	211	12,80	102,37
		12	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	12,50%	25,00%	37,50%	50,00%	27	94	14,36	114,89
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	13	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	58,00%	15,00%	30,00%	48,00%	58,00%	-	-	0,00%	0

6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	14	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	-	-	25,00%	100
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	15	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	-	-	25,00%	100
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	-	-	40,00%	100
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	17	Indeks Profesionalitas ASN UPT	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00	-	-	-	-
8	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	18	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	-	-	100,00	108,696

Lubuklinggau,
Kepala Loka POM di Lubuklinggau

Afdil Kurnia, S.si, Apt
NIP. 197106101999031001